

ANALISIS DAMPAK PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR KOTA AMBON TERHADAP DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

(Studi Kasus :Kecamatan Sirimau)

SKRIPSI

Oleh

NUR ARFANY PAYAPO

NIM 45 09 042 031



BOSOWA



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS '45' MAKASSAR
2014

**ANALISIS DAMPAK PERKEMBANGAN KAWASAN
PESISIR KOTA AMBON TERHADAP DAYA DUKUNG
LINGKUNGAN**

(Studi Kasus :Kecamatan Sirimau)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik (S.T)

UNIVERSITAS

Oleh
BOSOWA

NUR ARFANY PAYAPO

NIM 45 09 042 031



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS '45' MAKASSAR
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS DAMPAK PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR KOTA
AMBON TERHADAP DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

Disusun dan diajukan oleh

NUR ARFANY PAYAPO

45 09 042 031

Menyetujui

Pembimbing I

Ir. Hj. Rahmawati Rahman, M.Si

NIDN 0907046801

Pembimbing II

Ir. Baharuddin Koddeng, MSA

NIDN 0009124404

Pembimbing III

Rusnen, ST, M.Si

NIDN 0915038602

Mengetahui

Dekan
Fakultas Teknik

Dr. Ir. H. Agus Salim, M.Si

NIDN 0917087102

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota

S. Kamfan Aksa, ST, M.T

NIDN 0911077407



HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar, Nomor : A. 03/SK/FT.U-45 pada tanggal 4 Juni 2014 tentang **PANITIA DAN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN PLANOLOGI**, Maka :

Pada Hari/Tanggal : 4 Juni 2014

Skripsi : Nur Arfany Payapo

Nomor Pokok : 45 09 042 031

Telah diterima dan disahkan Panitia Ujian skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar, setelah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara Jenjang Strata Satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ir. H. Agus Salim, Msi
Sekertaris : Drs. Abd. Azis Mattola, MSP
Anggota : Ir. Baharuddin Koddeng, MSA
S. Kamran Aksa, ST, M.T
Ir. Rahmawai Rahman, M.Si
Ir. Abd. Munir HB, M.Sc
Rusneni, ST. M.si
Ir. Hamid Umar, MT



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

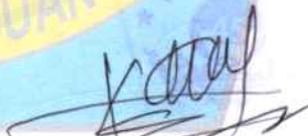


Disahkan :
Dekan Fakultas Teknik
Universitas "45" Makassar

Diketahui :
Ketua Jurusan Perencanaan
Wilayah dan Kota Universitas
"45" Makassar



(DR. Ir. H. Agus Salim. M.Si)



(S. Kamran Aksa, ST. MT)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Arfany Payapo
NIM : 45 09 042 031
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya sendiri, atau bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2014

Yang menyatakan

Nur Arfany Payapo

ABSTRAK

Nur arfany payapo (4509042031) dengan judul skripsi "Analisis dampak perkembangan kawasan pesisir Kota Ambon terhadap daya dukung lingkungan". Penelitian ini dibimbing oleh ibu Ir. rahmawati rahman M,si selaku pembimbing I, Bapak Ir. Baharuddin Koddeng MSA selaku pembimbing II, dan Ibu Rusneni ST,M,si selaku pembimbing III.

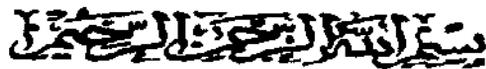
Penelitian ini dilaksanakan di kawasan pesisir Kecamatan Sirimau meliputi Kelurahan Honipopu, Kelurahan uritetu, Kelurahan Rijali dan Kelurahan Batu Merah .

Berkembangnya permukiman liar berupa rumah-rumah panggung dengan kemiringan lahan yang tidak layak, fasilitas-fasilitas pelayanan umum dan sosial yang terapung seperti pasar ikan terapung (pasar arumbai), pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan, dan yang paling penting berpengaruh adalah pasar tradisional dan terminal baik angkutan kota maupun angkutan luar kota yang terletak disepanjang jalan sekitar kawasan pesisir sehingga menyebabkan aktifitas penduduk banyak dilakukan di kawasan tersebut yang menyebabkan kegiatan pesisir Kota Ambon cenderung melebihi daya dukung lingkungan yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Deskriptif dan analisis Kesesuaian lahan (superimpose) . Analisis Deskriptif di gunakan untuk mengidentifikasi dampak perkembangan kawasan pesisir Kota Ambon. Analisis kesesuaian lahan (superimpose) digunakan untuk menentukan arahan pengembangan kawasan pesisir di masa yang akan datang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang timbul akibat perkembangan kawasan pesisir kota ambon yaitu pencemaran, abrasi pantai, erosi dan penurunan kualitas air laut. dengan menggunakan analisis Kesesuaian Lahan (superimpose) kawasan pesisir Kecamatan Sirimau dibagi menjadi 3 kawasan pengembangan yaitu pengembangan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa serta kawasan pengembangan pelabuhan.

Kata kunci: kawasan pesisir, daya dukung lingkungan



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian yang berjudul “ **Analisis Dampak Perkembangan Kawasan Pesisir Kota Ambon Terhadap Daya Dukung Lingkungan**”, ini dilaksanakan untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat Sarjana Teknik di Fakultas Teknik, Universitas Empat Lima Makassar.

Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-setulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, dorongan, semangat, dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti, selama penyusunan penelitian ini. Antara lain kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, bapak Drs.Hi. Moh. Yasin Payapo, M.Pd dan Ibu Hj. Saripa Karim, serta saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang serta kesabaran dalam membimbing dan membesarkan aku selama ini. Sehingga penulis dapat bertahan untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Teknik di Universitas '45 Makassar.

2. Bapak DR. Ir. H. Agus Salim. Msi. selaku dekan fakultas teknik universitas '45' Makassar
3. Bapak Ir. Kamran Aksa, MT, selaku ketua jurusan perencanaan wilayah dan kota, dan STAF jurusan yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini
4. Ibu Ir. Hj. Rahmawaty Rahman , M.Si selaku pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ir. Baharuddin Koddeng, M.SA, selaku pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, saran dan kritiknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Rusneni, ST M.Si, selaku pembimbing III dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingannya.
7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas 45 Makassar. Terutama Ibu CIA terima kasih atas pelayanan dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Teknik Universitas '45 Makassar.
8. Staf instansi BAPPEDA dan Dinas Tata Ruang Kota Ambon yang telah memberikan data penulis sehingga penyelesaian tugas akhir ini terselesaikan dengan tepat waktu.
9. untuk sahabat – sahabatku tercinta wawa, inggi, emma, an, atin, ija dan ikka.

10. Teman-teman seperjuanganku Planologi angkatan 2009, Terima kasih atas bantuan, kekompakan dan dukungannya selama ini. Mudah-mudahan kebersamaan yang terjalin tidak akan putus sampai kapanpun.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil.

Penulis sangat menyadari bahwa tugas ini masih dari kesempurnaan untuk sebuah karya tulis, ini terjadi karena keterbatasan literatur, pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak agar penulisan ini sesuai dengan prosedur yang telah ada. Selama dalam penulisan ini, penulis banyak mendapatkan hambatan dan kendala berkat arahan, bimbingan, dukungan dan partisipasi serta saran, kritik dari berbagai pihak, hingga penulisan tugas ini dapat selesai.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat pahala dan imbalan setimpal dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis dimasa yang akan datang.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, april 2014

Penulis

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR PETA..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian..... 5

D. Manfaat Penelitian..... 5

E. Ruang Lingkup Penelitian..... 6

F. Sistematika penulisan..... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kawasan Pesisir dan Wilayah Pesisir..... 9

B. Pokok – Pokok Pikiran UU No. 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir..... 14

C. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Menurut UU No. 2
3 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup..... 16

D. Lingkungan Ekosistem Pesisir.....	17
E. Perkembangan Kawasan Pesisir.....	20
F. Permasalahan Wilayah Pesisir.....	25
G. Daya Dukung Lingkungan Wilayah Pesisir dan Laut....	26
H. Prinsip – Prinsip Ekologi dan Kerusakan Sumber Daya Pesisir.....	30
I. Kebijakan Pembangunan Kota Ambon.....	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	45
B. Jenis dan Sumber Data.....	45
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Analisis Data.....	47
E. Defenisi Operasional.....	50
F. Variabel Penelitian.....	51
G. Jadwal dan Waktu Penelitian.....	51
H. Kerangka Pikir.....	52

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Ambon.	
1. Aspek Fisik Dasar	
a. Letak dan Batas Administrasi Kota Ambon.....	53
b. Kondisi Iklim.....	54
c. Jenis Tanah	57
2. Aspek Kependudukan.....	58

3. Morfologi Kota.....	59
B. Gambaran Umum Kawasan Pesisir Kota Ambon	
1. Aspek Fisik Dasar	
a. Letak dan Batas Administrasi.....	60
b. Topografi dan Kemiringan Lereng.....	67
c. Klimatologi.....	69
d. Geologi dan jenis Tanah.....	70
e. Hidrologi.....	74
f. Pola Penggunaan Lahan.....	75
2. Karakteristik Sosial Kependudukan	
a. Jumlah dan Perkembangan Penduduk.....	78
b. Sosial Budaya.....	81
3. Karakteristik Fisik Pantai.....	82
4. Ekosistem Kawasan Pesisir Kota Ambon.....	84
5. Dampak Perkembangan Kawasan Pesisir terhadap daya dukung lingkungan.....	87
C. Analisis Aspek Fisik Dasar Kawasan Pesisir	
1. Letak dan Batas Administrasi Kota Ambon.....	89
1. Topografi dan Kemiringan Lereng.....	91
2. Kondisi Iklim.....	92
3. Geologi dan Jenis Tanah.....	93
4. Hidrologi.....	94
D. Analisis Aspek Kependudukan.....	94

E. Analisis sosial masyarakat.....	96
F. Analisis Pola Penggunaan Lahan.....	96
G. Analisis Dampak Perkembangan Pesisir.....	97
H. Analisis Dampak Perkembangan Kawasan Pesisir Kota Ambon Terhadap Daya Dukung Lingkungan.....	100
I. Analisis Kesesuaian Lahan Kawasan Pesisir Kota ambon terhadap Perkembangan Kawasan Pesisir.....	101
J. Analisis Arah perkembangan Kawasan Pesisir terhadap Daya Dukung lingkungan	108

BAB V**PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	111

Daftar Pustaka

Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Kelurahan di Kecamatan Sirimau.....	65
Tabel 4.2	Jumlah Wilayah dan Luas di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau Kota Ambon 2012.....	68
Tabel 4.3	Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Ambon Tahun 2008 – 2012.....	73
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk dan Perkembangan Penduduk di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau Tahun 2008 – 2012.....	85
Tabel 4.5	Jumlah dan Kepadatan penduduk di Kawasan Pesisir Kota Ambon.....	86
Tabel 4.6	Skoring Kelas Lereng.....	102
Tabel 4.7	Skoring Kelas Jenis Tanah.....	102
Tabel 4.8	Skoring Kelas Curah Hujan.....	103
Tabel 4.9	Analisis Skor Lokasi Kesesuaian Lahan di KawasanPesisir Kecamatan Sirimau Kota Ambon.....	118

DAFTAR PETA

Peta Administrasi Kota Ambon	60
Peta Administrasi Kecamatan Sirimau.....	67
Peta Deliniasi Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau.....	68
Peta Administrasi kawasanpesisir Kec. Sirimau.....	70
Peta Kemiringan Lereng.....	72
Peta Struktur Geologi	76
Peta Jenis Tanah.....	77
Peta Penggunaan Lahan.....	84
Peta Kepadatan Penduduk.....	87
Peta Analisis Kesesuaian Lahan terhadap Daya Dukung Lingkungan ..	107
Peta Zonasi Pengembangan Kawasan Pesisir Kec. Sirimau Kota Ambon	110

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Kawasan pesisir dan lautan Indonesia yang kaya dan beragam sumber daya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu makanan utama, khususnya protein hewani. Sementara itu, kekayaan sumber daya alam dan mineral lainnya yang terdapat di kawasan ini juga telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional. Kawasan pesisir dan lautan Indonesia memiliki berbagai fungsi lain seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata serta kawasan permukiman dan tempat pembuangan limbah.

Potensi sumber daya alam kawasan pesisir dan laut ini secara garis besar dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu sumber daya dapat dipulih (*renewable resources*), sumber daya tidak dapat dipulih (*non renewable resources*) dan jasa-jasa lingkungan. walaupun Ketiga potensi ini telah dimanfaatkan, tetapi masih belum optimal dan terkesan tidak terencana dan terprogram dengan baik (Dahuri dkk, dalam Etika R Utami, 2012).

Kawasan pesisir dan lautan beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan tumpukan harapan bagi

bangsa Indonesia di masa depan. Di dalamnya terkandung kekayaan sumber daya alam yang sangat kaya dan beragam seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, minyak dan gas, bahan tambang dan mineral, dan kawasan pariwisata. Akan tetapi, pembangunan kawasan pesisir dan lautan selama ini menunjukkan hasil yang kurang optimal. Di beberapa kawasan pesisir yang padat penduduk dan tinggi intensitas pembangunannya terdapat berbagai gejala kerusakan lingkungan termasuk pencemaran, degradasi fisik habitat utama pesisir (mangrove, terumbu karang, estuaria, dan lain-lain) dan abrasi pantai. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan perikanan, pertambangan, perhubungan, industri, konservasi habitat, pariwisata dan permukiman, telah menimbulkan berbagai permasalahan yang berpotensi besar memicu konflik kepentingan antar pihak, sehingga berdampak pada kelestarian fungsi dan kerusakan sumber daya alam.

Kota Ambon merupakan kota pesisir dengan luas kawasan 377 Km². Kota Ambon dengan letak posisi geografis 3⁰-4⁰ LS dan 128⁰-129⁰ BT, merupakan kota tepi pantai dengan garis sepanjang 120,95 Km. Secara administratif Kota Ambon, terbagi dalam 5 wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Leitimur Selatan, Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Kecamatan Teluk Ambon. Kota Ambon menjadi



pusat aktivitas perdagangan dan jasa, perkembangan Kota Ambon dimulai dari kawasan pesisir kemudian merambah ke wilayah daratan yang selanjutnya meluas sampai ke wilayah perbukitan.

Kegiatan industri, pasar dan permukiman dikawasan pesisir Kota Ambon yang berkembang relatif cepat telah menyebabkan peningkatan beban limbah yang mengalir ke pantai. Sementara itu, kegiatan pendaratan kapal nelayan dan penumpang yang jumlahnya sangat meningkat drastis telah menyebabkan terjadinya pencemaran air sungai dan laut oleh tumpukan bahan bakar dan minyak kapal-kapal yang diawaki oleh orang-orang yang kepeduliannya terhadap lingkungan masih buruk.

Kawasan pesisir Kecamatan Sirimau mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang meliputi perikanan, pelabuhan niaga, pariwisata, industri, dll. Pemanfaatan potensi pesisir untuk kegiatan perikanan, perhubungan, industri, permukiman, dan lain-lain selain menimbulkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, seringkali juga menimbulkan berdampak negatif bagi kelestarian lingkungan fisik. Pemanfaatan potensi pesisir untuk pengembangan kawasan memang sangat potensial.

Berkembangnya permukiman liar berupa rumah-rumah panggung dengan kemiringan lahan yang tidak layak, fasilitas-fasilitas

pelayanan umum dan sosial yang terapung seperti pasar ikan terapung (pasar arumbai), pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan, dan yang paling penting berpengaruh adalah pasar tradisional dan terminal baik angkutan kota maupun angkutan luar kota yang terletak disepanjang jalan sekitar kawasan pesisir sehingga menyebabkan aktifitas penduduk banyak dilakukan dikawasan tersebut yang menyebabkan kegiatan pesisir Kota Ambon cenderung melebihi daya dukung lingkungan yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan

Perkembangan kawasan pesisir Kota Ambon diharapkan mampu menjadi motor pergerakan bagi pendapatan asli daerah. Akan tetapi, seiring dengan jalannya pembangunan maka akan terjadi perubahan terhadap fisik lingkungan yang mengubah tatanan ekosistem kawasan tersebut, baik dari segi hidrologi, vegetasi, dan kemampuan atau daya dukung tanah. Selain itu perubahan sosial dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar juga memberikan pengaruh pada perkembangan kawasan pesisir. Hal tersebut memunculkan gagasan untuk mengkaji seberapa jauh kemungkinan penurunan kualitas yang terjadi akibat dari adanya aktivitas perkembangan kawasan pesisir Kota Ambon. Dengan pertimbangan tersebut di atas maka perlu untuk dilakukan penelitian tentang “ **Analisis Dampak Perkembangan Kawasan Pesisir Terhadap Daya Dukung Lingkungan di Kota Ambon**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan Permasalahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana dampak perkembangan kawasan pesisir terhadap daya dukung lingkungan ?
2. Bagaimana arahan Pengembangan pemanfaatan lahan kawasan pesisir Kecamatan Sirimau dengan daya dukung lingkungan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelittian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dampak perkembangan kawasan pesisir terhadap daya dukung
2. Untuk mengetahui arahan pengembangan kawasan pesisir terhadap daya dukung lingkungan .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam study ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat menjadi salah satu referensi bagi penentu kebijakan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon khususnya dalam mengambil kebijakan pengembangan Kota Ambon dan daerah lain saat ini maupun pada masa yang akan datang.

2. Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya, terutama terhadap kasus-kasus kawasan pesisir dengan perkembangannya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam study penelitian ini ruang lingkup yang digunakan meliputi lingkup kawasan dan ruang lingkup materi.

1. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni dibatasi pada cakupan pembahasan yang menyangkut upaya untuk mengidentifikasi perkembangan kawasan pesisir Kecamatan Sirimau dan untuk mengetahui perkembangan kawasan pesisir Kecamatan Sirimau dengan daya dukung lingkungan.

2. Ruang Lingkup Kawasan

Ruang lingkup kawasan merupakan batasan kajian penelitian yang mana ditinjau dari aspek administrasi. Adapun lokasi penelitian yang diambil guna untuk mengkaji dampak perkembangan Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau terhadap daya dukung lingkungan yakni pada Kecamatan Sirimau yang mencakup 4 (empat) wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Honipopu, Kelurahan Uritetu, Kelurahan Rijali dan Desa Batu Merah. Dengan fokus penelitian adalah kawasan pesisir Kecamatan Sirimau

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan susunan atau tatanan dalam pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud yaitu :

BAB I : Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini membahas tentang pengertian kawasan pesisir dan wilayah pesisir, pokok-pokok pikiran UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau pulau kecil, pengertian, peran dan fungsi lingkungan, lingkungan ekosistem pesisir, permasalahan kawasan pesisir, daya dukung wilayah pesisir dan laut, , prinsip – prinsip ekologi dan daya dukung sumber daya pesisir.

BAB III : Pada bab ini membahas tentang lokasi penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, variabel penelitian dan kerangka pikir penelitian.

BAB IV : Pada bab ini membahas tentang aspek fisik dasar Kota Ambon, aspek kependudukan Kota Ambon, kebijakan pembangunan Kota Ambon terhadap kawasan pesisir,

aspek fisik dasar kawasan pesisir, aspek kependudukan kawasan pesisir, sosial budaya, pola penggunaan lahan, karakteristik kawasan pesisir Kecamatan Sirimau, analisis kedudukan kawasan penelitian dalam konstelasi tata ruang Kota Ambon, Analisis aspek fisik dasar kawasan, analisis aspek kependudukan, analisis aspek sosial budaya, analisis penggunaan lahan, analisis dampak perkembangan kawasan pesisir, analisis perkembangan kawasan pesisir terhadap daya dukung lingkungan, analisis kesesuaian lahan dan analisis arahan pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Sirimau

BAB V : Pada bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kawasan Pesisir dan Wilayah Pesisir

1. Pengertian Teoritis

Kawasan pesisir adalah kawasan pertemuan antara daratan dengan lautan. Ke arah darat kawasan pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat seperti pasang surut angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, kawasan pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiart *dalam* Rokhmin Dahuri, dkk, 2001:8).

Batasan diatas menunjukkan bahwa garis batas nyata kawasan pesisir tidak ada. Batas kawasan pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di daerah landai dengan sungai besar, garis batas ini dapat jauh dari garis pantai. Sebaiknya di tempat yang berpantai curam dan langsung berbatasan dengan laut dalam, kawasan pesisirnya akan sempit. Kawasan pesisir mencakup antara lain esturia, terumbu karang, hutan payau, hutan rawa, dan bukit pasir (Supriharyono, 2000:2)

Menurut kesepakatan internasional yang terakhir, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah perairan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air atau pasang surut dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*). Berdasarkan fakta-fakta batas wilayah pesisir dari berbagai negara dari berbagai negara dapat disimpulkan bahwa:

- a. Batas wilayah pesisir ke arah darat umumnya adalah jarak secara artitrer dari rata-rata pasang tinggi (*mean high tide*) dan batas ke arah laut umumnya adalah sesuai dengan batas yudisium provinsi.
- b. Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat dari batas untuk wilayah perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk wilayah pengaturan (*regulating zone*)
- c. Batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir dapat berubah, disebabkan oleh erosi atau sedimentasi.

Berdasarkan defenisi-defenisi tersebut, dapat diartikan bahwa wilayah pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai potensi yang besar, namun juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Dalam banyak kasus permasalahan yang menyangkut pemanfaatan ruang pesisir adalah hasil aktivitas manusia. Permasalahan yang timbul terutama

kerusakan lingkungan pesisir, merupakan permasalahan yang bersifat ekstranalitas, artinya pihak yang menimbulkan kerusakan lingkungan tidak berAda dalam lingkungan masyarakat yang terkena dampak, tetapi berada di luar kelompok masyarakat itu.

Secara umum kawasan pesisir Mempunyai 3 fungsi sebagai berikut :

1. Zona Pemanfaatan, yaitu sebagai kawasan yang dapat dieksploitasi.
2. Zona Preservasi, yaitu wilayah yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, kecuali untuk kegiatan penelitian.
3. Zona Konservasi, yaitu kawasan yang dipergunakan untuk implementasi konsep pembangunan yang berkelanjutan, sehingga pemanfaatannya tidak boleh melebihi daya dukung lingkungan, atau kalau ada kerusakan lingkungan harus sgera dipulihkan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan untuk provinsi dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten dan kota.

Dengan demikian kewenangan Daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut.
- b. Pengaturan administratif.
- c. Pengaturan tentang tata ruang
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang di keluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah
- e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan
- f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

2. Batasan Pengertian Wilayah Pesisir Di Indonesia

Sejalan dengan praktek penentuan wilayah pesisir yang dilakukan oleh beberapa negara di Asia, Amerika dan Eropa tersebut yang menggunakan pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan dan pendekatan administratif ataupun gabungan dari pendekatan-pendekatan (*multiple approach*), maka dalam penentuan wilayah pesisirnya, Indonesia juga menggunakan batasan pengertian berdasarkan pendekatan dari segi perencanaan untuk memperlihatkan batasan secara yuridis dari wilayah pesisir Indonesia.

Batas wilayah pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di daerah pesisir yang landai dengan sungai besar, garis batas ini dapat berada jauh dari garis pantai. Sebaiknya di tempat yang berpantai curam dan langsung berbatasan dengan laut dalam wilayah pesisir akan sempit (Supriharyono, *dalam*Etika resti Utami , 2012)

Pengertian pesisir juga bisa dijabarkan dari dua segi yang berlawanan, yakni dari segi daratan dan dari segia laut. Dari segi daratan adalah wilayah daratan sampai wilayah laut yang masih dipengaruhi oleh sifat – sifat darat (seperti : angin darat, drainase air tawar dari sungai, sedimentasi), sedangkan dari segi laut , pesisir adalah wilayah laut sampai wilayah darat yang masih dipengaruhi sifat–sifat laut (seperti : pasang surut, salinitas, intrusi air laut ke wilayah daratan, angin laut).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 Tentang Pedoman Umum perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Wilayah pesisir didefenisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk Kabupaten / Kota dan ke arah darat batas administrasi Kabupaten / Kota.

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengertian wilayah pesisir adalah : ' wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut' Dengan demikian berdasarkan UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Indonesia menggunakan pendekatan secara ekologis yang menyatukan wilayah daratan dan lautan yang mempunyai keterkaitan secara ekologis, termaksud di dalamnya ekosistem pulau kecil dan perairan di antara satu kesatuan pulau-pulau kecil.

B. Pokok – Pokok Pikiran UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir yang rentan tersebut mengalami kerusakan akibat dari aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya atau bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat sektoral di wilayah pesisir atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir atau perundangan yang ada sering menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir. Peraturan perundangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya.

Sementara kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kurang di hargainya masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir seperti sasi, seke, panglima laot. Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau non-hayati disubstitusi dengan sumber daya lain.

Oleh sebab itu, keunikan wilayah pesisir yang rentan , berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia bisa dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi. Prakasa masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisir dengan baik, dan yang telah berhasil perlu di beri insentif namun yang merusak perlu diberi sanksi. Norma-norma pengelolaan wilayah pesisir disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan dang pengendalian.

Norma-norma pengelolaan wilayah pesisir difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundangan yang ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkan. Dalam melaksanakan norma pengelolaan tersebut akan diatur peran kelembagaan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta sebagai pemangku kepentingan baik kepentingan daerah, nasional maupun internasional.

C. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Menurut UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan / atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

5. Ketentuan tentang rencana usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

D. Lingkungan Ekosistem Pesisir

Tipologi ekosistem pesisir berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan dalam ekosistem alami dan ekosistem buatan (Dahuri R, 2001). Ekosistem pesisir di Indonesia sebagai daerah tropis adalah sebagai berikut :

1. Hutan mangrove merupakan tipe hutan khas tropika yang tumbuh di sepanjang pantai hutan atau muara sungai. Kehidupan tumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh suplai air tawar dan salinitas, pasokan nutrien dan stabilitas substrat. Hutan mangrove banyak dijumpai di pantai yang landai dengan muara sungai yang berlumpur dengan kondisi perairan yang tenang dan terlindung dari ombak. Arti penting hutan mangrove adalah sebagai sumber makanan bagi berbagai macam hewan laut. Sistem perakaran yang kokoh akan melindungi pantai dari erosi, gelombang angin, dan ombak. Hutan mangrove juga merupakan daerah asuhan (*nursery ground*) dan pemijahan (*spawning ground*) bagi udang, ikan dan karang-karangan. (Saenger Etal 1983, dalam Rokhim Dahuri : 82) telah

mengidentifikasi lebih dari 70 macam mangrove baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

2. Padang lamun merupakan tumbuhan yang hidup terbenam di perairan dangkal yang agak berpasir. Secara ekologis padang lamun memiliki beberapa fungsi penting bagi daerah pesisir yaitu : sumber utama produktivitas primer, sumber makanan penting bagi organisme, dengan sistem perakaran yang dapat menstabilkan dasar perairan yang lunak, tempat berlindung organisme, tempat pembesaran bagi berbagai spesies, sebagai perendam arus gelombang dan sebagai tudung poelindung panas matahari. Kehidupan padang lamun sangat dipengaruhi oleh kondisi kecerahab air laut, temperatur air laut, salinitas, substrat dan kecepatan arus.
3. Terumbu karang (*coral reef*) merupakan ekosistem khas di daerah tropis. Terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan massif terutama kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang, alga berkapur dan organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat (Nybakken, dalam Dahuri: 2001) ekosistem terumbu karang memiliki produktivitas yang tinggi dan kaya akan keragaman spesies penghuninya seperti ikan karang. Terumbu karang merupakan ekosistem pesisir yang memiliki nilai estetika alam yang sangat tinggi. Terumbu karang juga berfungsi sebagai

pelindung ekosistem pesisir dan laut dari tekanan gelombang. Keberadaan terumbu karang sangat ditentukan oleh kondisi kecerahan perairan, temperatur, salinitas, kecepatan arus air, sirkulasi dan sedimentasi.

4. Estuaria adalah teluk pesisir yang sebagian tertutup, tempat air tawar dan air laut bercampur. Kebanyakan estuaria didominasi oleh substrat berlumpur yang kaya bahan organik dan menjadi cadangan makanan utama bagi organisme esturia. Karena merupakan kawasan pertemuan antara air laut dan air tawar, maka organisme dan tumbuhan yang berkembang di esturia relatif sedikit. Pantai pasir terdiri dari kwarsa dan feldspar, yang merupakan sisa pelapukan bantuan di gunung yang dibawa oleh aliran sungai. Pantai pasir lainnya terbentuk oleh rombakan pecahan terumbu karang yang diendapkan oleh ombak. Partikel yang kasar menyebabkan hanya sebagian kecil bahan organik yang terselip sehingga organisme yang hidup di pantai berpasir relatif sedikit. Meskipun demikian pantai berpasir sering dijadikan beberapa biota (seperti penyu) untuk bertelur. Parameter utama dari pantai berpasir adalah pola arus yang mengangkat pasir, gelombang yang melepas energi dan angin yang menyangkut pasir ke arah darat.
5. Pantai berbatu (*Rocky Beach*) merupakan pantai dengan batu-batu memanjang ke laut dan terbenam di air. batuan yang terbenam ini

menciptakan zonasi kehidupan organisme yang menempel di batu karena pengaruh pasang. Parameter utama yang mempengaruhi pantai berbatu adalah pasang laut gelombang laut yang mengenainya.

6. Pulau-pulau kecil (*Small Island*) merupakan pulau yang berukuran kecil yang secara ekologis terpisah dengan pulau induknya. Pulau kecil ini akan memiliki karakteristik ekologi yang bersifat insular karena terisolasi dengan pulau induknya.

E. Perkembangan Kawasan Pesisir

Pertumbuhan dan perkembangan kota pada prinsipnya menggambarkan proses berkembangnya suatu kota. Pertumbuhan kota mengacu pada pengertian secara kuantitas, yang dalam hal ini diindikasikan oleh besaran faktor produksi yang dipergunakan oleh sistem ekonomi kota tersebut. Semakin besar produksi berarti ada peningkatan permintaan yang meningkat. Sedangkan perkembangan kota yang mengacupada kualitas yaitu proses menuju suatu keadaan yang bersifat pematangan. Secara umum kota akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui keterlibatan aktivitas sumber daya manusia berupa peningkatan jumlah penduduk dan sumber daya alam kota yang bersangkutan (Hendarto, 1997)

Secara fisik, Kota merupakan kawasan terbangun diperkotaan yang terletak saling berdekatan, yang meluas dari pusatnya hingga ke

pinggiran kota, hal ini memberikan gambaran konsentrasi bangunan atau areal terbangun yang ada dikota cenderung lebih besar atau lebih padat dibandingkan dengan daerah pinggiran atau daerah pedesaan. Bangunan merupakan unsur yang pertama dibangun dikota setelah air dan makanan tersedia, penggunaan bangunan beragam sesuai dengan beragamnya kegiatan manusia yang menghuninya kategori utama penggunaan bangunan perkotaan terdiri dari permukiman, perdagangan, industri, pemerintah dan transportasi, unsur ini membentuk pola penggunaan lahan Kota.

Secara sosial, Kota memberikan gambaran sebuah komunitas yang di ciptakan pada awalnya untuk meningkatkan produktifitas melalui konsentrasi dan spekulasi tenaga kerja, kebudayaan dan kegiatan rekreatif. Dalam hal ini, kota merupakan strata dari komunitas yang heterogen dan dapat di kelompokkan, berdasarkan kelompok - kelompok tertentu yang membutuhkan ruang untuk berekreasi disamping pekerjaan yang ditekuni. Aspek ini di pandang perlu bagi masyarakat perkotaan sebagai suatu kebutuhan guna menghilangkan kejenuhn sehabis beraktivitas.

Secara ekonomi, Kota memberikan makna fungsi dasar suatu kota sebagai tempat menghasilkan penghasilan yang cukup melalui produksi barang dan jasa untuk mendukung kehidupan penduduknya dan untuk kelaksanaan kota itu sendiri. Disini dapat diartikan adanya

aktifitas perkotaan, dimana ekonomi perkotaan yang sehat mampu menyediakan berbagai kebutuhan untuk keperluan pertumbuhan perkotaan, terutama untuk menerima perkembangan baru yang disebabkan oleh kemajuan di bidang teknologi dan perubahan keadaan (Hendro, 2001)

Dalam uraian tersebut, kawasan pesisir yang memiliki potensi sumber daya yang besar termasuk ketersediaan lahan yang dapat dikembangkan menjadi daerah perkotaan, pada dasarnya memiliki potensi dalam membentuk wajah suatu kota, dimana keberadaan pesisir pada suatu daerah perkotaan ternyata menambah suasana tersendiri bagi kota tersebut.

Permasalahan adalah bagaimana memadukan kepentingan dinamika perkembangan kota dengan fungsi ekologis yang disandang oleh kawasan pesisir sebagai penghubung antara ekonomis wilayah daratan dan lautan sebab pengaruh pembangunan desa, dengan demikian halnya dnegan kawasan pesisir yang terletak di wilayah perkotaan, secara langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi pelaksanaan pembangunan di sekitarnya, pengaruh secara fisik adalah karena pembanguan kota mengubah keadaan fisik lingkungan alam menjadi lingkungan buatan manusia. Dalam Kota keadaan lingkungan alam sulit untuk dipertahankan kelestarian dalam wujud aslinya sehingga lahirnya lingkungan buatan manusia.

Permasalahannya adalah sejauh mana fungsi lingkungan alam dapat digantikan oleh lingkungan buatan manusia titik kritis sehingga berdampak negatif terhadap kehidupan manusia.

Tujuan dalam pengembangan dan pengendalian dipesisir adalah memanfaatkan segenap sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan lautan secara berkelanjutan. Menurut Dahuri (2001) , pembangunan berkelanjutan yang merupakan strategi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasinya, memiliki dimensi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya, sosial politik serta hukum dan kelembagaan.

Dari dimensi ekologis, agar pembangunan kawasan pesisir dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka harus memenuhi 3 persyaratan utama yaitu :

1. Setiap kegiatan pembangunan hendaknya ditempatkan dilokasi yang secara biofisik (ekologis) sesuai dengan persyaratan biofisik dari kegiatan pembangunan tersebut. Dengan kata lain, perlu adanya tata ruang pembangunan kawasan pesisir dan lautan. Untuk keperluan penyusunan tata ruang ini. Dibutuhkan informasi tentang karakteristik biofisik suatu wilayah dan persyaratan biofisik dari setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Selain

itu, perlu juga informasi tentang tata guna lahan pesisir yang ada saat ini (eksisting).

2. Lajunya pembuangan limbah pada kawasan pesisir dan lautan hendaknya tidak melebihi kapasitas asimilasi kawasan tersebut. Artinya perlu pengendalian pencemaran, untuk itu diperlukan informasi tentang sumber dan kuantitas limbah dan setiap jenis limbah yang masuk dalam kawasan pesisir dan lautan, tingkat kualitas perairan pesisir dan lautan, kapasitas asimilasi perairan tersebut.
3. Tingkat pemanfaatan sumber daya alam kawasan pesisir dan lautan, khususnya yang dapat dipulihkan, hendaknya tidak melampaui kemampuan pulihnya (potensi lestari) dalam kurung waktu tertentu, artinya perlu pemanfaatan sumber daya alam pulih yang ada di wilayah pesisir dan lautan dan permintaan (*Demand*) terhadap sumber daya alam tersebut dari waktu ke waktu, dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan seperti minyak bumi dan gas mineral, perlu dilakukan secara cermat dan dampak negatif yang mungkin timbul ditekan seminimal mungkin. Untuk itu diperlukan informasi tentang dampak lintas kegiatan (sektoral) dan integrasi antar ekosistem.

Dalam dimensi ekonomi mensyaratkan bahwa laju perkembangan pembangunan hendak direncanakan sedemikian rupa, sehingga permintaan total sumber daya alam dan jasa lingkungan yang terdapat pada kawasan pesisir dan lautan tidak melebihi kemampuan ekosistem pesisir dan lautan untuk menyediakannya.

Perkembangan suatu kota atau bagian dari kota termasuk kawasan pesisir secara umum di pengaruhi oleh 3 faktor (Hendarto, 1997) yaitu :

1. Faktor Penduduk adalah adanya penambahan penduduk baik yang disebabkan karena pertumbuhan alami maupun imigrasi
2. Faktor Sosial Ekonomi adalah perkembangan usaha masyarakat
3. Faktor Sosial Budaya adalah adanya perubahan pola atau tata cara kehidupan masyarakat.

F. Permasalahan Wilayah Pesisir

Petensi dan permasalahan wilayah pesisir telah banyak dikemukakan oleh para pakar kelautan dan pesisir. Isu – isu permasalahan wilayah pesisir secara global berdasarkan hasil kajian di berbagai wilayah pesisir di dunia dikemukakan oleh Rebert kay (1999). Pokok permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir menurutnya adalah sebagai berikut : pertumbuhan penduduk khususnya di negara miskin

dan berkembang, pemanfaatan wilayah pesisir, dampak lingkungan dari kegiatan dan kelemahan administratif.

Permasalahan wilayah pesisir yang dikemukakan oleh Rohmin Dahuri (2001) merupakan permasalahan umum wilayah pesisir yang banyak dijumpai di Indonesia. Dikemukakan bahwa permasalahan wilayah pesisir meliputi : pencemaran, kerusakan habitat pantai, pemanfaatan sumber daya yang berlebihan, abrasi pantai, konversi kawasan lindung dan bencana alam. Permasalahan – permasalahan tersebut sebagian besar diakibatkan oleh aktifitas kegiatan manusia baik yang tinggal dalam kawasan maupun yang berada di luar kawasan.

G. Daya dukung Lingkungan wilayah Pesisir dan Laut

Daya dukung merupakan konsep dasar yang dikembangkan untuk kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Konsep ini dikembangkan untuk mencegah kerusakan atau degradasi sumberdaya alam dan lingkungan.

Daya dukung merupakan istilah yang lebih umum untuk karakter lingkungan dan kemampuannya dalam mengakomodasi suatu kegiatan tertentu atau laju suatu kegiatan tanpa dampak yang tidak dapat diterima (Gesamp, 1986 *dalam* Nautilus Consultants, 2000). Dalam prakteknya, dikenal beberapa istilah daya dukung. Daya dukung adalah jumlah organisme, atau jumlah kegiatan usaha atau

total produksi, yang dapat didukung oleh suatu area, ekosistem atau garis pantai yang didefinisikan (Nautilus Consultants, 2000). Untuk suatu wilayah yang didefinisikan, dikenal dengan istilah daya dukung wilayah, yaitu kemampuan wilayah tersebut dalam mempertahankan berbagai pemanfaatan sumber daya (kegiatan pembangunan) (Clark, 1992).

Daya dukung suatu wilayah tidak bersifat statis tetapi dapat menurun akibat kegiatan manusia yang menghasilkan limbah atau kerusakan alam, seperti bencana alam, atau bahkan dapat ditingkatkan melalui pengelolaan wilayah secara tepat (Clark, 1996).

Scones (1993) menyatakan bahwa daya dukung dibagi menjadi dua, yaitu : daya dukung ekologis dan daya dukung ekonomis. Daya dukung ekologis adalah jumlah maksimum makhluk hidup pada suatu lahan yang dapat didukung tanpa mengakibatkan kematian karena faktor kepadatan, serta terjadinya kerusakan lingkungan secara permanen. Daya dukung ekonomi adalah tingkat produksi (skala usaha) yang memberikan keuntungan maksimum dan ditentukan oleh tujuan usaha secara ekonomi.

Menurut Bengen (2002), konsep daya dukung didasarkan pada pemikiran bahwa lingkungan memiliki kapasitas maksimum untuk mendukung suatu pertumbuhan organisme. Daya dukung dibedakan

menjadi 4 macam, yaitu : daya dukung ekologis, fisik, sosial dan ekonomi.

1. Daya Dukung Ekologis : tingkat maksimum (baik jumlah maupun volume) pemanfaatan suatu sumber daya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu kawasan sebelum terjadi penurunan kualitas ekologis.
2. Daya Dukung Fisik : jumlah maksimum pemanfaatan suatu sumberdaya atau ekosistem yang dapat diabsorpsi oleh suatu kawasan tanpa menyebabkan penurunan kualitas fisik.
3. Daya Dukung Sosial : tingkat kenyamanan dan apresiasi pengguna suatu sumberdaya atau ekosistem terhadap suatu kawasan akibat adanya pengguna lain dalam waktu bersamaan.
4. Daya Dukung Ekonomis : tingkat skala usaha dalam pemanfaatan suatu sumberdaya yang memberikan keuntungan ekonomi maksimum secara berkesinambungan.

Dari keempat daya dukung tersebut yang sering digunakan adalah daya dukung ekologis dan daya dukung fisik, yang juga disebut sebagai daya dukung lingkungan.

Menurut Purnomo (1992), menyatakan bahwa daya dukung lingkungan merupakan nilai mutu lingkungan yang ditimbulkan oleh interaksi dari semua unsur atau komponen (fisika, kimia dan biologi) dalam suatu kesatuan ekosistem. Daya dukung lingkungan lahan

pantai untuk pertambakan ditentukan oleh kualitas air, air sumber (asin dan tawar), hidro-osenografi (arus, pasang surut), topografi dan klimatologi daerah pesisir dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di daerah hulu. Dengan kata lain daya dukung lingkungan ditentukan oleh kualitas / karakteristik lahan dan perairannya.

Allen dan Hardy (1980) *dalam* Clark (1996) menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan dampak lingkungan, daya dukung lingkungan merujuk pada tingkat maksimum kegiatan yang akan mengakibatkan penurunan sumberdaya secara fisik atau kerusakan habitat alami. Dalam konteks pembangunan, sering digunakan istilah batas perubahan yang dapat diterima. Konsep ini kelihatan lebih fleksibel dengan harapan dampak bawanya karena pembangunan akan memodifikasi sumber daya (Clark, 1996).

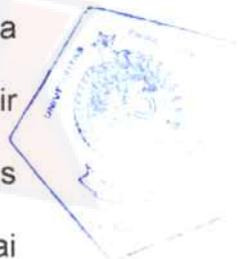
menurut Notohadiprawiro (1991) kemampuan lahan menyiratkan daya dukung lahan sehingga yang mempengaruhi kemampuan lahan yaitu: jenis tanah / geologi, curah hujan / iklim, kemiringan lereng dan bahaya areal.

Salah satu faktor yang berpengaruh besar dan juga sangat dipengaruhi oleh pembangunan adalah faktor sumber daya alam dan daya dukung lingkungan. Sumber daya alam dan daya dukung lingkungan ini salah satunya adalah lingkungan, fisik yang merupakan tempat dilaksanakannya pembangunan. Dari kenyataan tersebut

diperlukan adanya keserasian antara pembangunan yang dilakukan dengan daya dukung fisik. Untuk mencapai keserasian tersebut, hal yang perlu dilakukan adalah mengetahui kemampuan daya dukung lingkungan fisik. Dengan diketahuinya daya dukung lingkungan fisik, maka dapat ditentukan juga kegiatan pembangunan yang sesuai dengan daya dukung tadi. Dalam penentuan kesesuaian lahan ini dilakukan deliniasi wilayah menjadi kawasan lindung dan budi daya.

H. Prinsip – Prinsip Ekologi dan kerusakan Sumber Daya Pesisir

Meskipun belum ada kesepakatan tentang definis (batasan) wilayah pesisir (*coastal zone*) baik di tingkat nasional maupun dunia, namun terdapat kesepakatan umum wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka suatu wilayah pesisir memiliki 2 macam batas (*boundaries*) yaitu : batas yang sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross shore*). Untuk keperluan pengelolaan, penetapan batas – batas wilayah pesisir yang sejajar dengan garis pantai relatif mudah. Akan tetapi, penetapan batas – batas suatu wilayah pesisir yang tegak lurus terhadap garis pantai, sejauh ini belum ada kesepakatan, dengan perkataan lain, batas wilayah pesisir berbeda dari suatu negara ke negara yang lain. Hal ini dapat dimengerti, karena setiap



negara memiliki karakteristik lingkungan, sumber daya dan sistem pemerintahan tersendiri (Bengen,2002).

Definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah pertemuan antara darat, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiarto,1976). Sedangkan menurut kesepakatan internasional, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan darat, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*) (Beatley et al, 1994)

Secara ekologis, batas ke arah laut dari suatu wilayah pesisir adalah mencakup daerah peralihan laut yang masih dipengaruhi oleh proses alamiah (seperti aliran air tawar dan sungai maupun run – off) maupun kegiatan manusia (seperti pencemaran dan sedimentasi) yang terjadi di daratan. Batas ke arah darat dan ke arah laut dari suatu wilayah pesisir bersifat spectic atau bergantung pada kondisi

biogeofisik wilayah berupa topografi dan geomorfologi pesisir, keadaan pasang surut dan gelombang, kondisi DAS (daerah Aliran Sungai) dan kegiatan pembangunan yang terdapat di daerah hulunya.

Definisi wilayah pesisir sebagaimana dikemukakan di atas memberikan suatu pengertian bahwa wilayah pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia.

Umumnya kegiatan pembangunan, secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem pesisir. Salah satu bentuk keterkaitan antara ekosistem darat di wilayah pesisir dapat dilihat dari pergerakan air sungai, aliran air limpasan (*runoff*), aliran air tanah (*ground water*) dengan berbagai materi yang terkandung di dalamnya (seperti nutrien, sedimen dan bahan pencemar) yang akhirnya bermuara di perairan pesisir. Pola sedimentasi dan abrasi juga ditentukan pergerakan massa air ini dari daratan maupun laut. Disamping itu pergerakan massa air ini juga berperan dalam pemindahan biota perairan (misalnya plankton, ikan dan udang) dan bahan pencemar dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya (Alikodra, 2008 dalam Etika R utami, 2012).

Besarnya potensi wilayah pesisir menimbulkan pola pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan, yang berakibat timbulnya berbagai masalah lingkungan, saat ini, permasalahan lingkungan di wilayah pesisir Indonesia sangat beragam, mulai dari masalah over capacity di sektor perikanan, perusakan hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun serta abrasi pantai dan gelombang pasang hingga masalah tsunami. Permasalahan ini sangat terkait dengan kemiskinan masyarakat pesisir, kebijakan yang tidak tepat, rendahnya penegakan hukum (*law enforcement*), dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia (Dahuri, 2003). permasalahan perikanan misalnya disebabkan karena buruknya pengelolaan perikanan yang dapat dilihat dari adanya fenomena over capacity. Fenomena over capacity disebabkan kekuatan armada perikanan dunia lebih cepat daripada perkembangan produksi (Fauzan, 2005).

Masalah penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan disebabkan karena alat pengumpul ikan atau *Fish Aggregating Devices* (FAD) digunakan untuk mengumpulkan ikan di daerah lepas pantai. Alat tersebut mampu mengumpulkan spesies ikan pelagis yang berenang secara bergerombol di perairan dalam dan tidak atau daerah dasar yang dangkal. Masalahnya seringkali FAD berhubungan dengan karang

tersebut digunakan tidak di perairan dalam, tetapi di perairan dangkal dan berhubungan dengan daerah dasar yang dangkal (Dahuri, 2003)

Penggunaan bahan peledak, bahan beracun (sodium dan potasium sianida) dan pukat harimau dalam penangkapan ikan karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang penggunaan bahan peledak (bom) dan bahan beracun berpotensi menimbulkan kerusakan yang sangat luas terhadap ekosistem terumbu karang (Dahuri, 2003). yang ada di sekitar lokasi peledakan, hal ini juga dapat menyebabkan kematian organisme lain yang bukan merupakan target. Oleh karena itu,

Masalah pencemaran wilayah pesisir di Indonesia terutama bersumber dari kegiatan manusia di daratan, seperti kegiatan industri, pertanian, dan rumah tangga. Menurut Dahuri (2003) sumber pencemaran di wilayah pesisir di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelas yaitu industri, limbah cair permukiman (*sewage*), limbah cair perkotaan (*urban stormwater*), pertambangan, pelayaran (*shipping*), pertanian dan perikanan budi daya. Sedangkan jenis – jenis bahan pencemar utama terdiri dari sedimen, unsur hara, logam beracun (*toxic metals*), pestisida, organism eksotik, organisme patogen, dan bahan – bahan yang menyebabkan oksigen terlarut dalam air berkurang (*oxygen depleting substance*)

Penyebab utama pencemaran wilayah pesisir adalah :

1. masih rendahnya kepedulian industri sepanjang DAS dan pesisir terhadap sistem pengelolaan limbah cair yang masuk ke perairan umum.
2. kurang ketatnya pengawasan limbah oleh instansi terkait
3. belum jelasnya penerapan sanksi terhadap industri yang melanggar isi dokumentasi amdal dan peraturan perundangan yang berlaku (PP No. 27 Tahun 99 dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup)
4. rendahnya kepedulian masyarakat pesisir terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan sekitarnya serta pola bangunan yang membelakangi pantai
5. rendahnya pengetahuan masyarakat pantai tentang pengetahuan lingkungan (Dahuri,2003).

Pencemaran perairan pantai dapat mengakibatkan (a) rendahnya daya dukung lingkungan dan kualitas perairan pesisir; (b) menimbulkan bau yang tidak menyenangkan untuk daerah unjungan wisata; (c) meningkatnya wabah penyakit menular penyakit menular terhadap kehidupan masyarakat pesisir; (d) menurunnya tingkat keberhasilan budidaya (Dahuri, 2003). Lebih lanjut Dahuri (2003) menyatakan penyebab utama meningkatnya sedimentasi di perairan pantai antara lain : (1) penebangan hutan di daerah aliran sungai; (2)

penambangan pasir di sepanjang aliran sungai; (3) curah hujan yang tinggi. Selanjutnya sedimentasi dapat mengakibatkan pendangkalan muara sungai dan alur pelayaran; (4) kekeruhan di muara sungai serta rusaknya terumbu karang.

I. Kebijakan Pembangunan Kota Ambon

1. Kebijakan Pembangunan Kota Ambon terhadap Kawasan Pesisir

Kebijakan pembangunan di bidang pesisir dan kelautan Kota Ambon sebagai kebijakan strategis diharapkan dapat membawa kemakmuran rakyat, mengembangkan harkat dan martabat Daerah serta mampu mensejajarkan diri dengan komunitas negara maju di dunia. Kebijakan tersebut didasarkan pada obyektifitas ilmiah (scientific objectivity) yang dibangun berdasarkan asas partisipatif dan diarahkan agar rakyat sebagai penerima manfaat terbesar. Kebijakan Pembangunan Pesisir Kota Ambon juga merupakan suatu konsep menyeluruh dari tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memakmurkan kehidupan Masyarakat Maluku.

Kebijakan Pembangunan Pesisir Kota Ambon tidak dapat dilepaskan dari arahan Kebijakan Pembangunan Kota Ambon dan Kebijakan Pengembangan Ruang Kota. Adapun Kebijakan Pembangunan Kota Ambon didasarkan pada Visi dan Misi Kota

Ambon serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Dalam uraian Rencana Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah Kota Ambon, ada beberapa kebijakan yang berhubungan dengan wilayah pesisir Kota Ambon, yaitu :

- a. Kawasan lindung lokal yang ditetapkan berupa Kawasan hutan mangrove yang ada di Kawasan pesisir pantai Lateri dan Passo, Waiheru di Pesisir Teluk Ambon Dalam, dengan pendekatan jarak peyangga sekitar 100 meter, sedangkan Kawasan terumbu karang yang berada di Kawasan Hative Besar
- b. Kawasan lindung sempadan pantai dan sungai diarahkan untuk Kawasan yang masih mungkin dipertahankan, seperti Kawasan Halong, Latta, Lateri, Passo, Negeri Lama, Nania, Waiheru, Hunuth, Batu Karang, Poka dan Rumah Tiga
- c. Kawasan lindung DAS yang ditujukan untuk tetap mempertahankan eksistensi keberadaan hutan primer dan sekunder yang ada di wilayah Kota Ambon.
- d. Pengembangan pusat permukiman diarahkan di Kawasan Hative Besar.
- e. Kawasan wisata bahari yang berada disekitar pesisir Kota Ambon, pesisir pantai Lateri-Passodan Waiheru

- f. Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut didalam buku rencana tata ruang laut ini tetap mengacu pada Rencarta Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon.

2. Kebijakan Pembangunan Ruang

Tinjauan secara umum terhadap kebijakan pengembangan ruang Kota Ambon dalam rangka pembangunan Kawasan pesisir, terkait kedudukan, fungsi dan peranan maupun arahan pengembangannya. Arah pengembangan Kota Ambon telah ditetapkan dengan adanya Rencana struktur ruang Kota Ambon yang merupakan penjabaran lebih lanjut dan RENSTRA Kota Ambon Tahun 2011 - 2031, yang membagi wilayah Kota Ambon jadi 4 (empat) Satuan Wilayah Pengembangan, yakni:

- a. SWP I, sub wilayah Pusat Kota dan Kilang dengan pusat pelayanan di Pusat Kota.
- b. SWP II, sub wilayah Passo dan Hutumuri dengan pusat pelayanan di Passo
- c. SWP III, sub wilayah Rumah Tiga dan Laha dengan pusat peayanan di Rumah Tiga.
- d. SWP IV, sub wilayah Latuhalat dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Amahusu.

Untuk mendukung fungsi pelayanan yang diembankan oleh setiap SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) Kota Ambon, maka

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon, ditetapkan hirarki pusat-pusat pelayanan di Kota Ambon yang dtsebut dengan sentra-sentra pelayanan sebagai berikut:

a. Sentra Primer

Kota Ambon, melayani kegiatan berskala wiiayah atau regional dan skala kota dengan konsentrasi kegiatan sebagai berikut;

1. Pusat pemerintahan baik tingkat propinsi maupun pemerintah kota
2. Perdagangan, jasa dan fasilitas pariwisata
3. Perhubungan laut dan telekomunikasi
4. Pelayanan jasa ekonomi dan keuangan
5. Perumahan
6. Pendidikan

Passo, melayani kegiatan berskala kota dan sebagian berskala wiiayahdengan konsentrasi kegiatan sebagai;

1. Pusat perdagangan skala kota dan regional
2. Pusat perkernbangan perumahan baru
3. Perhubungan, industri dan pergudangan
4. Pusat kerajinan rakyat dan wisata lokal
5. Pendidikan umum dan kejuruan
6. Terminal transit angkutan darat skala regional

b . Sentra Sekunder

Poka - Rumah Tiga, melayani kegiatan berskala kota/regional, dikonsentrasikan sebagai:

1. Lokasi pendidikan tinggi dan penelitian kelautan
2. Perumahan
3. Perdagangan lokal
4. Angkutan penyebrangan rakyat
5. Pengembangan pertanian

Laha - Tawiri, melayani kegiatan skala kota terbatas, yaitu dengan konsentrasi sebagai;

1. Bandar Udara Internasional
2. Markas TNI-AU
3. Perumahan
4. Galangan Kapal
5. Perikanan
6. Pertambangan Galian C

c. Sentra Tersier

Nania / Waiheru, melayani kegiatan berskala lokal dengan konsentrasi kegiatan sebagai perumahan dan perdagangan lokal.

Galala / Hative Kecil, melayani kegiatan berskala lokal dengan konsentrasi kegiatan sebagai perumahan, perdagangan, jasa lokal, serta perikanan.

Benteng / Amahusu, melayani kegiatan berskala lokal dengan konsentrasi kegiatan sebagai perumahan, perdagangan lokal, wisata.

Latuhalat, melayani kegiatan berskala lokal dengan konsentrasi kegiatan sebagai perumahan, perdagangan lokal, perikanan, pariwisata dan industri batu bata.

Kilang / Naku / Hukurila, melayani kegiatan berskala lokal dengan konsentrasi pada pertanian, perikanan dan perumahan

Hutumuri, melayani kegiatan berskala lokal dengan konsentrasi pada pertanian, perikanan dan perumahan.

1. Pola Pemanfaatan Ruang

Arah rencana pola pemanfaatan ruang Kota Ambon, secara umum terbagi atas pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya.

a. Kawasan Lindung

1. Kawasan Hutan Lindung, di sepanjang Gunung Nona, pegunungan Sirimau dan Jasirah Leihitu

2. Kawasan Resapan Air, Daerah Batu Gajah, Batu Meja, Batu Merah, Batu Gantung Dalam, Kuda Mati, Kusu-kusu dan sekitar Gunung Nona
 3. Sempadan Pantai
 4. Sempadan Sungai
 5. Kawasan Sekitar Mata Air, sumber air Wainitu, air keluar, air besar, wai pompa, air panas, Wainlu 1 dan 2, dan Wai Batu Gajah
 6. Pantai Hutan Bakau, kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan perlindungan kehidupan pantai dan lautan yang berada disepanjang Teluk Ambon (Desa Passo, Lateri, Poka dan Tawuri)
 7. Taman Wisata Alam, kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata maupun rekreasi alam, taman laut Amahusu, Eri, Airlow, Hative Besar, Wayame dan Toisapu.
- b. Kawasan Budidaya
1. Kawasan Pemukiman, dan luas daerah dataran Kota Ambon 359,45 Km², maka 53,93 Km² adalah kawasan pemukiman. Adanya topografi yang berbukit dan bergunung menjadikan daerah kawasan pesisir yang lebih datar menjadi pilihan

untuk kegiatan pemukiman. Pengembangan area pemukiman ini diarahkan sepanjang pesisir Desa Tawiri, Native Besar, Rumah Tiga, Poka, Hunuth, Waiheru, Nania, Negri Lama dan Passo

2. Kawasan Pariwisata, yang direncanakan adalah jenis wisata bahari. Kawasan yang diarahkan pengembangannya adalah wilayah Kecamatan Nusaniwe (Desa Laiuhalat dan Amahusu), Kecamatan Sirimau (Desa Hukurila dan Soya), Kecamatan TA Baguala (Desa Passo, Rumah Tiga, Lateri, Negri Lama, dan Laha). Kawasan ini diharapkan menjadi kawasan wisata terpadu.
3. Kawasan Industri, rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan industri diarahkan perkempangannya ke kawasan Batu gpng dan sekitarnya (Kecamatan Teluk Ambon Baguala). Juga diarahkan untuk pengembangannya industri di Desa Galala, Desa Hunuth untuk industri pengolahan hasil perikanan. Industri kerajinan pada daerah Batu Merah, serta Kota Ambon sebagai industri makanan ringan.
4. Kawasan Perdagangan dan Jasa, kawasan yang diarahkan pemanfaatannya sebagai kawasan komersial (perdagangan dan jasa) di Kota Ambon antara lain di Kota Ambon serta kawasan Passo.

5. Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Kelautan, rencana kawasan pendidikan tinggi diarahkan di Desa Rumah Tiga, Desa Poka, dan Kelurahan Tihu, yang merupakan kawasan Universitas Pattimura.
6. Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran, kawasan pemerintahan dan perkantoran dengan skala pelayanan kota umumnya di Kota ambon
7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan, kawasan pertahanan dan keamanan terdapat di Halong yaitu pangkalan TNI AL, di Waiheru untuk kompleks TNI AD, di Passo dan Tantui untuk kompleks POLRI, serta di Laha untuk Kompleks TNI AU.
8. Kawasan Pelabuhan dan Bandana, kawasan pelabuhan Yos Sudarso memiliki prspek untuk dikembangkan sebagai Pelabuhan Samudera karena memiliki kedalaman laut yang memungkinkan. Pengembangan fungsi tersebut diarahkan meningkatkan fasilitas pelabuhan Yos Sudarso dengan luas lahan 30,978 Ha, pelabuhan Slamet Riyadi untuk pelayaran lokal, dan ada pelabuhan khusus pangkalan TNI AL di Halong, pelabuhan pertamina di Wayame, pelabuhan kapal ikan di Pandan Kasturi, pelabuhan barang di Toisapu.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon meliputi kawasan pesisir Kota Ambon yang difokuskan pada Kecamatan Sirimau yang mencakup 4 (empat) wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Honipopu, Kelurahan Uritetu, Kelurahan Rijali dan Desa Batu Merah.

B. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan berbagai jenis data, baik jenis data kuantitatif maupun data kualitatif yang relevan dengan penelitian kedua jenis data yang digunakan tersebut yaitu:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif meliputi data seperti kondisi sarana, batas dan ruang lingkup penelitian, kemiringan lereng, geologi serta data penunjang lainnya.

2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif merupakan informasi yang diperoleh berkaitan dengan satuan-satuan angka yang memberikan keterangan berkenaan dengan jumlah seperti : luas kawasan pesisir, jarak dari ibukota, jumlah penduduk, kepadatan

penduduk, jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian, jenis fasilitas kota serta data penunjang lainnya.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan tanpa ada perantara antar peneliti dengan objek yang akan di teliti. seperti kondisi lokasi penelitian pada aspek penggunaan lahan, kondisi sarana dan prasarana, kondisi social masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung, artinya perantara antar peneliti dan objek yang diteliti seperti instansi pemerintahan, artikel dan keterangan dari tokoh adat.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi lapangan digunakan dengan melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang terdapat pada lokasi penelitian baik itu segi kondisi fisik lokasi, social budaya serta perekonomian yang terdapat pada lokasi penelitian. Sehingga dengan demikian peneliti dapat melakukan hipotesa (dugaan sementara) berkenaan dengan informasi yang didapat pada lokasi.

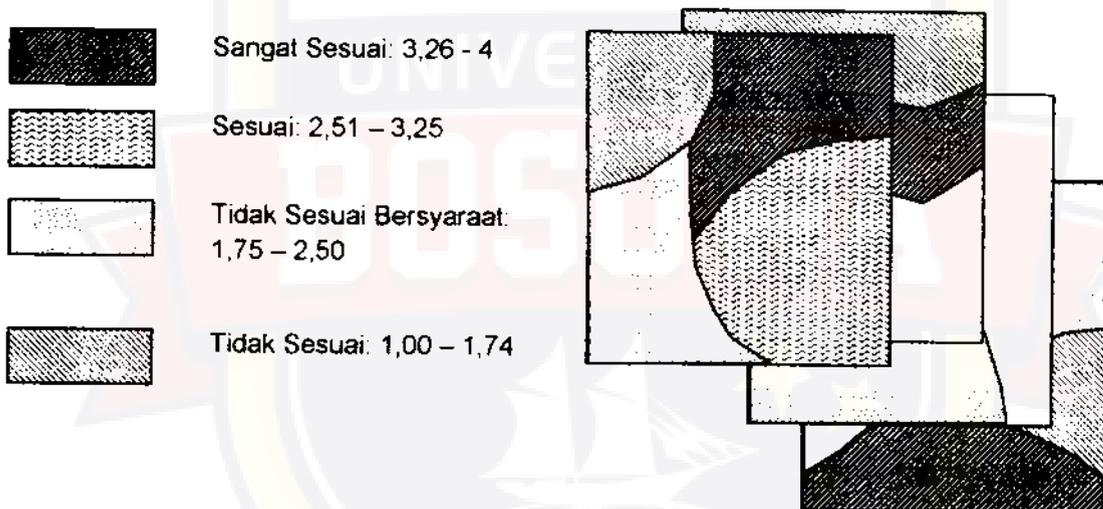
2. Survey Instansi di lakukan untuk menemukan data instansi kondisi fisik alamiah yang meliputi letak geografis, topografi dan kemiringan lereng. Klimatologi, geologi dan jenis tanah, hidrologi dan kependudukan serta data pendukung pelengkap lainnya peta – peta kawasan
3. Wawancara mendalam yang dilakukan baik secara struktural terhadap stakeholder terkait.
4. Kepustakaan (library research) adalah pengumpulan data dan informasi melalui literatur yang terkait dengan studi yang akan di lakukan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini diklasifikasikan atas beberapa teknik analisis yaitu :

- a. Analisis Deskriptif kualitatif yang dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir di lihat dari aspek daya dukung
- b. Untuk menjawab rumusan masalah diatas maka akan digunakan Analisis kesesuaian Lahan .Analisis kemampuan lahan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan lahan untuk dapat mendukung upaya pemanfaatan lahan di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau. Analisis kemampuan lahan ini sekaligus untuk mengetahui

faktor-faktor fisik lahan yang bersifat menghambat dan tidak menghambat dalam upaya pemanfaatan lahan, Proses analisis dilakukan dengan metode overlay (Superimpose) yang dilakukan melalui pendekatan GIS sebagai alat bantu. Prinsip dalam model analisis ini adalah Memperoleh lahan yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan (kesesuaian lahan pengembangan aktifitas Kawasan, Kota maupun Kabupaten. Penilaian dilakukan atas dasar metode pembobotan dan penilaian skor lokasi (*weighting and scoring*)



Analisis overlay yang digunakan adalah indeks overlay model (Benham dan carter diacu dalam Chandra, 2003). Pembobotan pada setiap faktor pembatas ditentukan berdasarkan dominannya parameter tersebut terhadap suatu peruntukan. Besarnya pembobotan ditujukan pada suatu parameter untuk seluruh analisis lahan misalnya : parameter jarak pantai mempunyai pembobotan

lebih tinggi dibandingkan dengan ketinggian untuk kesesuaian permukiman. Model matematis disajikan sebagai berikut ;

$$S_x = \frac{\sum S_{ij} W_i}{\sum W_i}$$

Dimana :

S_x = Indeks terbobot poligon terpilih

S_{ij} = Nilai kelas ke-j dalam peta ke-i

W_i = Bobot peta ke-i

Besarnya bobot dan skoring tidak memiliki nilai mutlak, karena hanya digunakan untuk memudahkan analisis terhadap evaluasi kesesuaian lahan. Adapun penentuan nilai kelas kesesuaian lahan untuk setiap peruntukan adalah :

3,26 - 4 : Sangat Sesuai

2,51 - 3,25 : Sesuai

1,76 - 2,50 : Tidak Sesuai Bersyarat

1,00 - 1,75 : Tidak Sesuai

Dari hasil pemanfaatan lahan akan diperoleh peta yang mendeskriptifkan pola penggunaan lahan yang sesuai bagi peruntukan kawasan tersebut. Dengan adanya aplikasi SIG, diharapkan kendala – kendala pengembangan kawasan ini dapat diperkecil, disamping itu perubahan luas jenis penggunaan lahan kegiatan tertentu pada setiap tempat dapat berbeda tergantung lokasi. Dengan demikian diharapkan pemilihan lokasi untuk

berbagai kawasan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat pengguna ruang maupun pemerintah pusat.

- c. Selain itu, Untuk menjawab rumusan masalah kedua maka akan digunakan analisis Deskriptif kualitatif untuk mengetahui arahan pengembangan kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau.

E. Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasinal variabel yang termasuk dalam lingkup kajian penelitian yakni :

- Kawasan pesisir adalah kawasan 2 (dua) dimensi yang terdiri dari unsur darat dan laut yang mana keduanya saling mempengaruhi
- Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- Ekosisitem adalah kesatuan komunitas tumbuh – tumbuhan, hewan, organisme dan non orgaanisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas
- Lingkungan adalah kesatuan ruang yang semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

F. Variabel Penelitian

Variabel yang dimaksud dalam penelitian ini yakni merupakan variabel atau parameter untuk mengetahui perkembangan di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau terhadap kesesuaian lahan dan variabel yang dapat mengukur daya dukung lingkungan Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau. Adapun variabel yang dimaksud yaitu :

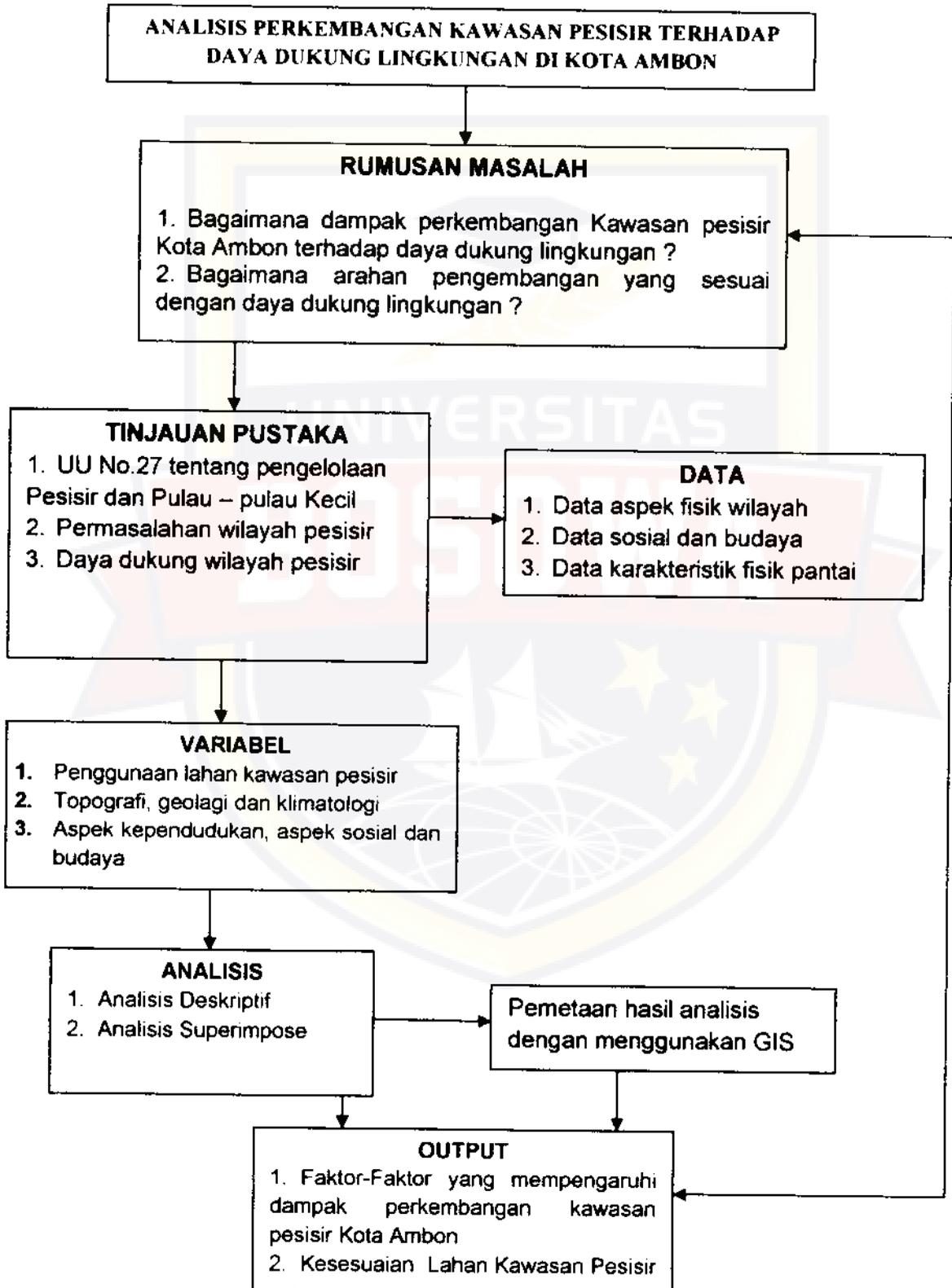
- a. Kondisi Lingkungan merupakan kondisi kekinian pada wilayah perkotaan yang berkenaan dengan Karakteristik fisik wilayah pesisir seperti : Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau, Topografi, Geologi dan Klimatologi.
- b. Aspek Kependudukan , Aspek Sosial dan Aspek Ekonomi

G. Jadwal dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan sampai dengan didapatkan data yang menurut peneliti dianggap telah mencukupi untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut. Pelaksanaan proses pengambilan data dilakukan selama \pm 1 Bulan (30 Hari) yang dimulai pada Bulan November 2013 dan berakhir pada bulan Desember tahun 2013.

H. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir sebagai berikut :



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Ambon

1. Aspek Fisik Dasar

a. Letak dan Batas Administrasi Kota Ambon

Kota Ambon merupakan Ibu Kota Provinsi Maluku dengan luas keseluruhan wilayah adalah 163.402 dengan garis pantai sepanjang 120,96 Km. Luas area laut Kota Ambon adalah 132.471 Ha (81,07 %). Secara administrasi Kota Ambon dengan luas wilayah daratan sebesar 35.944,52 Ha yang membujur di sepanjang pantai mengelilingi perairan Teluk Ambon dan Teluk baguala di pulau Ambon, secara administrasi wilayah Kota Ambon saat ini terbagi dalam 5 (lima) wilayah administrasi kecamatan berdasarkan pada perda Kota Ambon No 2 Tahun 2006, yaitu : Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Leitimur Selatan, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, dan Kecamatan Teluk Ambon serta meliputi 20 kelurahan dan 30 desa. Pada gambar 4.1 berikut dapat dilihat peta batas wilayah administrasi Pulau ambon Provinsi Maluku.

Secara geografis wilayah Kota Ambon terletak pada posisi geografis $3^{\circ} - 4^{\circ}$ LS dan $128^{\circ} - 129^{\circ}$ BT. Adapun batas – batas wilayah Kota Ambon sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan petuanan Desa Hitu, Desa Hila, Kecamatan Leihitu Maluku Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Timur berbatasan dengan petuanan Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan petuanan Desa Hatu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

b. Kondisi Iklim

Iklim di Kota Ambon adalah iklim laut tropis dan iklim musim iklim laut tropis dipengaruhi oleh lautan dan berlangsung bersamaan dengan iklim musim barat atau musim utara dan musim timur dan musim tenggara, yang diselingi oleh musim pancaroba atau musim peralihan. Musim barat umumnya berlangsung dari bulan Desember hingga Bulan Maret yang ditandai dengan curah hujan tinggi, dan diselingi oleh musim pancaroba pada bulan November yang merupakan transisi ke musim barat. Sedangkan curah hujan di Kota Ambon selalu bergantian dan berubah setiap tahun.

c. Topografi

Kota Ambon merupakan bagian dari Kepulauan Maluku yang merupakan pulau – pulau vulkanis, sehingga secara umum Kota Ambon memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit dan berlereng terjal. Sebesar 73 % dari luas wilayahnya dapat dikategorikan berlereng terjal, dengan kemiringan diatas 20% Hanya 17 % dari wilayah daratannya yang dapat diklasifikasikan datar atau tendai dengan kemiringan kurang dari 20 % Keadaan topografi Kota Ambon secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Sebaran wilayah daratan di Kota Ambon

No	Daerah	Ketinggian (m)	Kemiringan (%)	Luas (km ²)	%
1	Pusat kota dan sekitarnya	0-50	3,36	13,50	5,44
2	Rumah tiga dan sekitarnya	0-50	3,18	4,50	5,57
3	Passo dan sekitarnya	0-50	3,00	14,75	4,74
4	Laha dan sekitarnya	0-50	3,93	4,25	6,18
5	Hurumuri dan sekitarnya	0-50	6,16	4,25	9,70
6	Kilang dan sekitarnya	0-50	5,66	3,50	9,91
		50-250	6,56	3,25	10,3

Sumber: BPS Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2013

d. Jenis Tanah

Di Pulau Ambon pada umumnya terdapat 3 jenis tanah yaitu Tropohemist, Dystropepts dan Haplorthox. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

1. Jenis Tanah Tropohemist, merupakan tanah berawa, setengah terurai, masam kadang-kadang asin merupakan tanah organik di daerah beriklim panas termasuk tanah pada rawa gambut. Tanah jenis ini biasanya terdapat pada daerah cekungan rawa dan payau pada dataran aluvium, bakau atau di antara dua dataran tinggi dan di antara gilir. Jenis tanah ini terdapat di bagian timur Pulau Ambon, sekitar Batu Gong dan Passo.
2. Jenis Tanah Dystropepts, memiliki fisiologi yang agak teriapuk, berwarna kecoklatan, bertekstur halus sampai sedang. Bersifat masam, mengandung batuan basalt dan andesit, batuan pasir, campuran batu dan lumpur dengan Tuf masam. Tipe ini merupakan tanah dengan tingkat kesuburan sedang pada lapisan atas yang harus dilindungi. Jenis tanah ini terdapat di sebagian besar Pulau Ambon.
3. Jenis Tanah Haplorthox, merupakan tanah yang mengalami pelapukan dan pelindian berat. Berwarna kemerahan dengan tingkat kejenuhan basah rendah. tipe tanah ini merupakan tipe tanah sulit jika berada diatas batuan ultra basah,

jika kadar besi terlalu tinggi atau jika terlalu masam. Jenis tanah ini terdapat di Pulau Ambon bagian selatan atau sekitar Kecamatan Nusaniwe

e. Aspek Kependudukan

Sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku, Kota Ambon tergolong padat penduduk. Pada tahun 2013, penduduk Kota Ambon berjumlah 363,146 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 35.944,52 Ha, kepadatan Kota Ambon mencapai 8,32 Jiwa/Ha, dibandingkan dengan kota - kota berukuran sedang yang lain, tingkat kepadatan penduduk tersebut tergolong rendah, namun topografi wilayahnya berbukit-bukit sehingga sebagian besar wilayahnya tidak dapat dimanfaatkan, maka tingkat kepadatan di Kota Ambon dan kawasan-kawasan permukiman penduduk terasa lebih tinggi.

Meningkatnya jumlah penduduk Kota Ambon tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan secara alamiah, melainkan juga disebabkan oleh masuknya migran dari wilayah-wilayah sekitar maupun dari wilayah-wilayah lain di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi ini membuat perekonomian Kota Ambon bergerak secara dinamis dan cepat sehingga dalam tiga tahun terakhir pertumbuhannya mencapai 5,9 %.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran bersama sektor dengan sektor jasa-jasa merupakan sektor-sektor utama dalam

perekonomian Kota Ambon karena kota ini berperan sebagai pusat niaga dan jasa di Provinsi Maluku. Kedua sektor tersebut bahkan dipandang berperan penting dalam membangkitkan perekonomian Kota Ambon dengan kontribusi di kedua sektor ini mencapai lebih dari 50 % PDRB Kota Ambon.

Selain itu sebagian penduduk yang tinggal pada daerah pesisir pantai bekerja sebagai nelayan serta kegiatan ekonomi masyarakat yang lain adalah berdagang pada pasar-pasar tradisional, ada pula yang berwiraswasta dan menjual jasa. Terbatasnya lapangan kerja merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial ekonomi. Kesejahteraan ekonomi berpengaruh dalam masalah keluarga, seperti kondisi perumahan dan lingkungan tidak layak, masalah psikologis dan masalah kriminal.

f. Morfologi Kota

Sebagai kota yang berada di pesisir pantai, Kota Ambon berkembang sama seperti pada umumnya kota pantai yang dimulai dari kawasan pesisir terutama pada kawasan-kawasan yang berada disekitar pelabuhan-pelabuhan utama, kemudian merambah wilayah daratan yang selanjutnya meluas sampai kewilayah perbukitan. Dengan kondisi perkembangan seperti itu, tingkat kepadatan bangunan di kawasan pesisir pantai

pada umumnya menjadi sangat padat dan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan penggunaan lahan yang begitu cepat.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan kota yang berasal dari adanya aktivitas kelautan serta kondisi geografis yang menunjukkan Kota Ambon yang berada di Pulau Ambon merupakan salah satu bagian dan gugusan kepulauan yang ada di wilayah Provinsi Maluku, maka dengan sendirinya prorientasi aktivitas masyarakat akan banyak berhubungan dengan kawasan pesisir pantai. Kondisi saat ini menunjukkan, kawasan sekitar pelabuhan laut utama di Kota Ambon telah berkembang dengan sangat pesat dan membentuk Kota Ambon. Akibatnya bertumpuknya segala aktivitas kota disekitar kawasan pusat kota terutama aktivitas perdagangan dan jasa yang kemudian berimbas pada tingkat kepadatan bangunan dan penduduk menjadi sangat tinggi

B. Gambaran Umum Kawasan Pesisir Kota Ambon

1. Aspek Fisik Dasar

a. Letak dan Batas Administrasi

Secara administrasi wilayah Kota Ambon terletak di Kecamatan Sirimau yang terbagi ke dalam 14 wilayah administrasi kelurahan/desa dengan luas wilayah 86,81 Km² yang terletak pada

posisi geografis 03° sampai 04° Lintang Selatan (LS) dan 128° sampai 129° Bujur Timur (BT). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 yaitu Tabel Jumlah Luas Wilayah Kelurahan Di Kecamatan Sirimau di bawah ini.

Tabel 4.1
Luas Kelurahan Di Kecamatan Sirimau
Kota Ambon Tahun 2012

No	Kelurahan/Desa	Luas (Km2)
1	Batu Gajah	0,45
2	Batu Meja	0,85
3	Ahusen	0,24
4	Honipopu	0,34
5	Uritetu	0,35
6	Rijaii	0,28
7	Karang Panjang	0,43
8	Amantelu	1,15
9	Waihoka	0,75
10	Soya	59,65
11	Batu Merah	16,67
12	Pandang Kasturi	4,00
13	Native Kecil	1,53
14	Galala	0,12
	Jumlah	86,81

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka, Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan kelurahan yang paling luas pada Kecamatan Sirimau yaitu Kelurahan Soya dengan luas wilayah sebesar 56,65 Km², sedangkan kelurahan yang paling terkecil yaitu kelurahan Ahusen deng luas wilayah 0,24 Km².

Sebagai kecamatan yang merupakan Kota Ambon dan mempunyai garis pantai, Kecamatan Sirimau memiliki 4 (empat) wilayah diantaranya yang termasuk wilayah pesisir yaitu Kelurahan Honipopu, Kelurahan Uritetu, Kelurahan Rijali, dan Kelurahan Batu Merah. Adapun batas-batas wilayah Pesisir Kota Ambon, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Galala
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ahusen dan Amantelu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perairan Teluk Ambon Luar

Tabel 4.2
Jumlah Wilayah dan Luas Di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau Kota Ambon Tahun 2012

No	Kelurahan/Desa	Luas (Km ²)
1	Honipopu	0,34
1	Uritetu	0,35
2	Rijali	0,28
3	Batu Merah	16,67
Jumlah		17,64

Sumber: Kota Ambon Dalam Angka, Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas, memperlihatkan bahwa luas wilayah Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau yaitu 17,64 Km², dengan wilayah terluas berada di Kelurahan Batu Merah dengan luas

wilayah 16,67 Km² dan wilayah terendah berada di Kelurahan Rijali dengan luas wilayah 0,28 Km². Kelurahan Batu Merah merupakan kelurahan terluas di Kota Ambon karena sebagian wilayahnya termasuk kedalam wilayah administrasi Kota Ambon sedangkan, kelurahan Honipopu Kelurahan Uritetu dan Kelurahan Rijali merupakan Kelurahan yang batas administrasinya termasuk kedalam wilayah Kota Ambon. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini.





- Keterangan:**
- Batas Kawasan
 - Jalan Koc.
 - Sungai
- Kel.**
- Kel. Ahusan
 - Kel. Amantsu
 - Kel. Batu Galah
 - Kel. Batu Meja
 - Kel. Belumerah
 - Kel. Gliala
 - Kel. Hahae-Apeil
 - Kel. Hoiyopuu
 - Kel. Karang Panjang
 - Kel. Fanchang Kantari
 - Kel. Rijiil
 - Kel. Sioa
 - Kel. Uilleu
 - Kel. Waboka

©Buat Oleh:

NUR AFANY PAYAPO / 45 05 042.031

Pembimbing:

1. Ir. H. Rahmawati Dharma M. Di
2. Ir. Bahardin Kodar, M. SA
3. Rukman, ST, M. S.

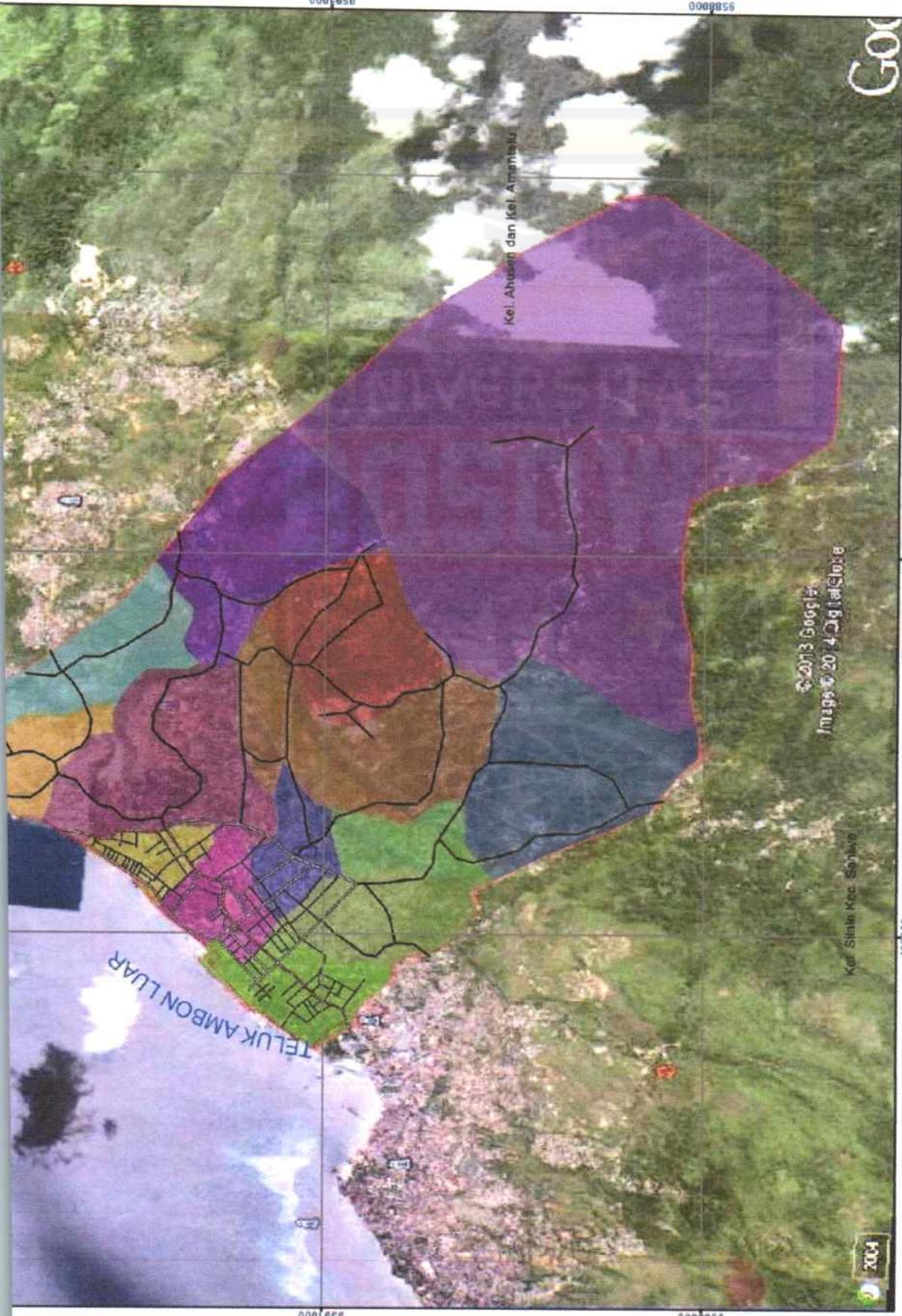


Sumber:

- Kantor BAP/PEDA Kota Ambon
- Citra Satelit Google Earth
- File Survey Tahunan 2011



Jurusan Peternakan Valsyian & Kotz
 Fakultas Teknik
 Universitas 45 Makassar
 2014



415000

412000

409000

KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON



Legenda:
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Jalan Koa

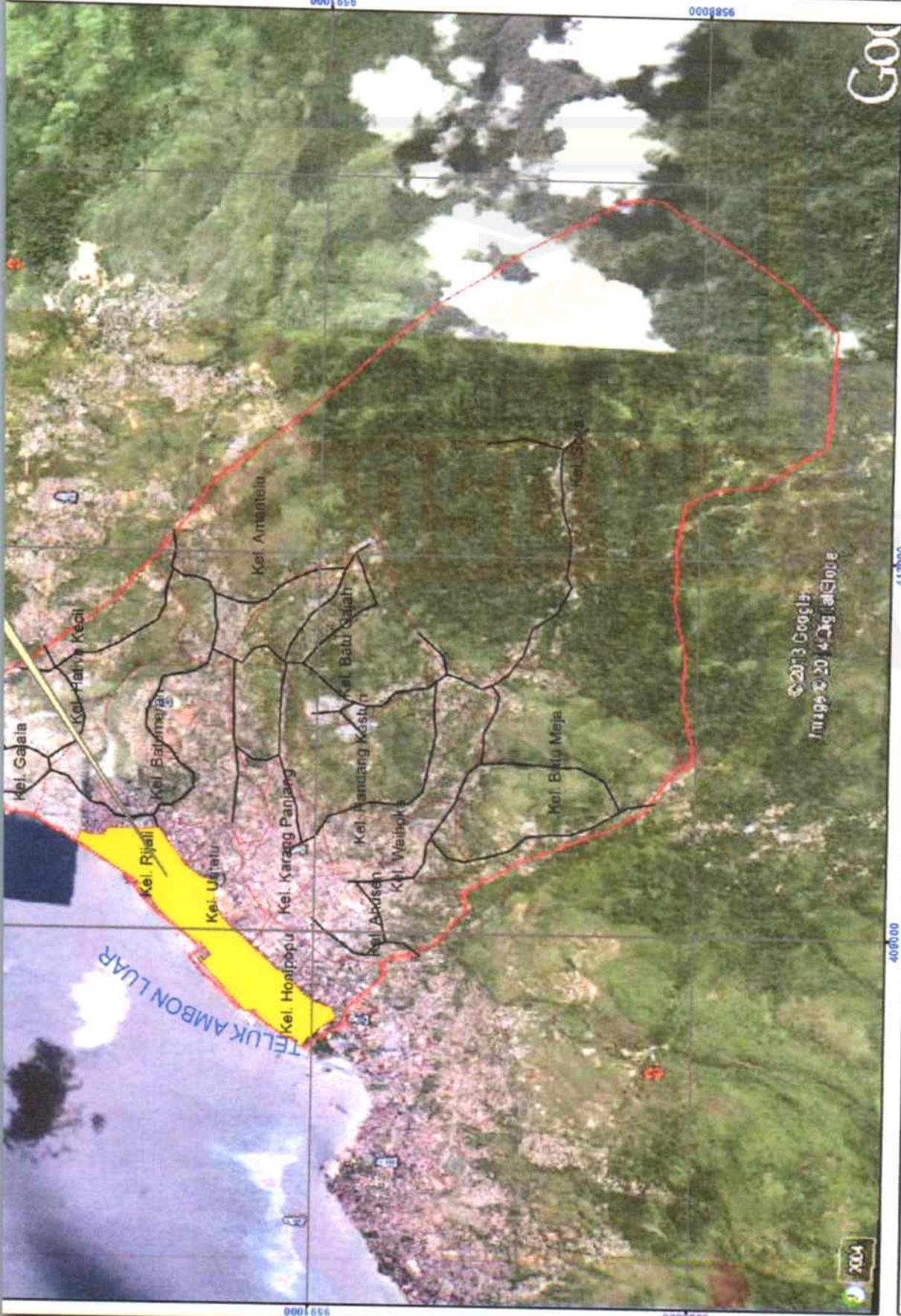
NURAFANY PAYAPO / 45 09 042 031

Pembimbing:
 1. Ir. H. Ramwani Rahman, M.Si
 2. Ir. Lihandien Kocoding N. DA
 3. Ruswani, ST M. Si



Sumber:
 - Kantor DAI-PI DA Kota Ambon
 - Data Spasi Google Earth
 - Hasil Survey Lapangan 2013

Jurusan Teknik Surveying & Geomatika
 Fakultas Teknik
 Universitas 45 Mataram
 2014



KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

Go

2014



117 000



KAWASAN:

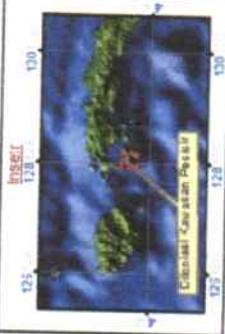
- Batas Kawasan
- Sungai
- Kelurahan Bat. Merah
- Kelurahan Hutanpaga
- Kelurahan R. G. C.
- Kelurahan U. H. B.

Cibuar, Obab.

NUR ARFANY PAYAPO / 45 09 512 031

Pembimbing:

1. H. H. Rekrewati Ramnan, M. Si.
2. I. D. Bahasan dan K. Lubis, M. BA.
3. R. Soesna, ST M. Si.

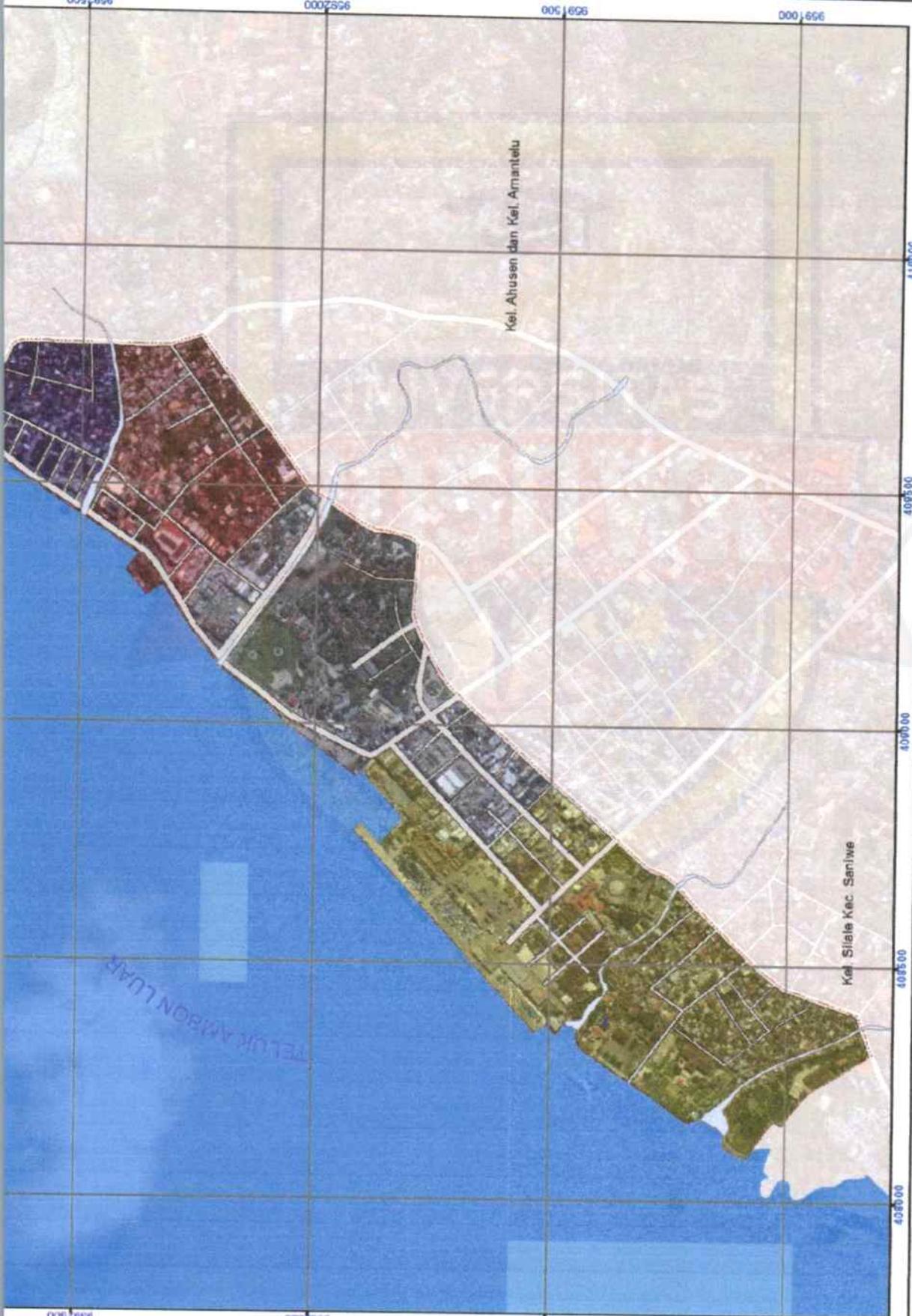


Gambar:

- Kantor BUREDA Kota Ambon
- Citra Satelit Google Earth
- Foto Satelit Lapangan 2012



Institut Pemerintahan Aliran & Kota
 Fakultas Teknik
 Jl. W. H. S. R. No. 45, Makassar
 2014



KAWASAN PESISIR KOTA AMBON

b. Topografi dan Kemiringan Lereng

Berdasarkan tinjauan umum Kota Ambon, bahwa topografi dan kemiringan lereng di Kota Ambon dari sekitarnya yaitu 0 - 50 meter diatas permukaan air laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng 3,360. Untuk keadaan topografi di Kota Ambon secara umum dapat dikelompokkan kedalam topografi yang relatif datar dengan ketinggian 0-20 meter dan kemiringan 0 - 10 % terdapat dikawasan sepanjang pantai dengan radius antara 0-300 meter dari garis pantai.

Untuk bentuk topografi di Kota Ambon yang memiliki 4 (empat) Kelurahan Honipopu, Kelurahan Uritetu, Kelurahan Rijali merupakan kelurahan yang memiliki bentuk lahan yang agak datar kecuali Desa Batu Merah yang memiliki kondisi topografi yang agak bergelombang menandakan bahwa Desa Batu Merah terletak didaerah yang memiliki ketinggian dan kemiringan yang lebih dari ketiga kelurahan tersebut Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi topografi dan kemiringan lereng di Kota Ambon dapat dilihat pada peta di bawah ini



1:12.000

KEMERDAGAL:

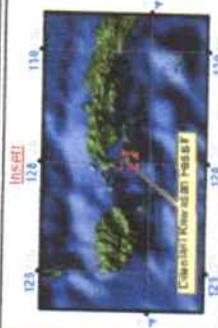
- Batas Kawasan
- ▭ Jalan
- ▭ Sungai
- Kemiringan**
- 0 - 2 %
- 2 - 10 %

Ditulis Oleh:

NUR ARFANY PAVAPO : 45 09 042 031

Dibuat oleh:

1. Ir. -1. Rahmawati Rahman, M.Eng.
2. Ir. Sastrawati Kusnadi, M. Sc.
3. Ruanen, ST, M. Sc.



Sumber:

- Kantor BAPPEDA Kota Ambon
- City Street Google Earth
- Hasil Survei Lapangan 2013



Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota
 Fakultas Teknik
 Universitas 45 Makassar
 2014



KAWASAN PESISIR KOTA AMBON

c. Klimatologi

Iklim yang terjadi di Kota Ambon sama dengan iklim yang terjadi semua wilayah Kota Ambon dimananya adalah iklim laut tropis dan iklim musim. Untuk lebih jelasnya mengenai iklim dan curah hujan di Kota Ambon, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3

Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kota Ambon Tahun 2008 - 2012

Bulan	2008		2009		2010		2011		2012	
	CH (mm)	HH								
Januari	194	20	103	12	97	16	79,0	17	152,6	21
Febuari	93	16	127	14	115	19	68,0	16	95,1	13
Manet	112	21	122	13	85	14	120,0	13	200,1	11
April	182	18	195	18	243	16	230,0	18	273,7	20
Mei	608	16	256	17	244	16	275,0	15	540,3	25
Juni	989	26	451	24	224	18	480,0	26	164,1	23
Juli	523	17	110	21	210	17	187,1	15	534,5	26
Agustus	14	9	35	12	215	15	29,2	10	233	16
Septembe	662	23	72	5	180	14	192,4	22	107,2	15
Oktober	24	4	18	6	34	8	129,3	5	201	31
Nopember	226	17	26	9	56	8	28,0	6	144,6	9
Desember	147	21	68	15	60	8	23,0	4	207,3	21
Jumlah	3674	205	1553	166	1773	169	1841	177	2854	231

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2013, BPS

Keterangan: CH = Curah Hujan HH = Hari Hujan mm = Milimeter

berdasarkan data yang tercatat di stasiun meterologi Ambon sesuai dengan tabel 4.4 di atas, terlihat bahwa pada tahun 2008 curah hujan mencapai 3.674 mm dari 208 hari hujan selama setahun, tetapi pada tahun 2012 curah hujan hanya 2.854 mm dari

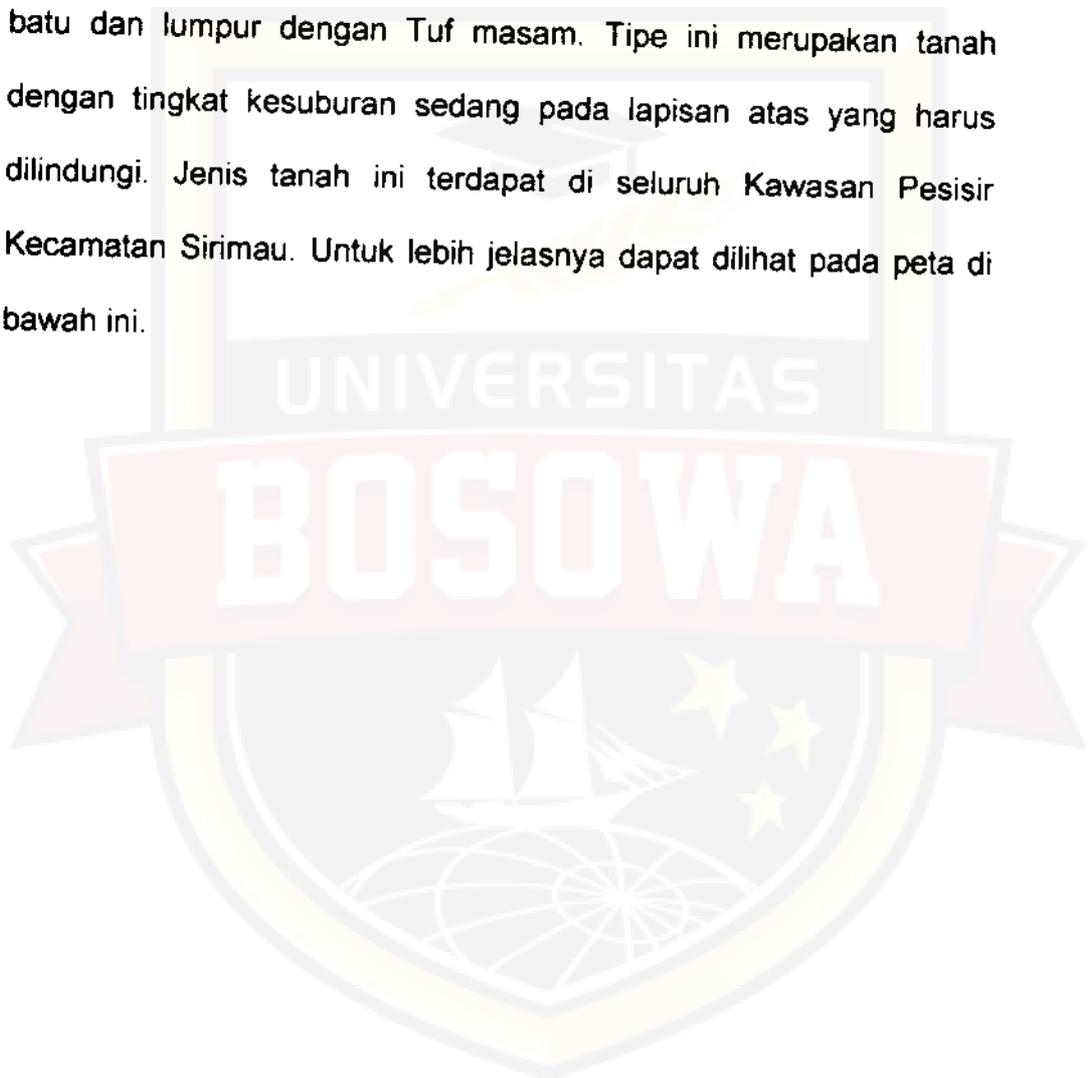
231 hari hujan, berarti dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan curah hujan sebesar 28,73 % dan penambahan 23 hari hujan. Kondisi selama tahun 2013 jika ditinjau perbulan, curah hujan dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Mei sebesar 540,3 mm dengan hari hujan sebesar 25 hari dan terendah pada bulan Februari dengan curahsekitar 95,1 mm dari 13 hari hujan.

Berdasarkan data akhir 2013, kondisi temperatur rata-rata diKota Ambon tercatat adalah 26,5° C dengan kisaran suhuminimum sebesar 24,4° C dan suhu maksimum mencapai 30,5° Cdengan kelembapan udara sekitar 81 % dan lamanya penyinaranrata -rata 40 %. Kecepatan angin rata-rata 4 knot dan sebagian besar bertiup dan arah barat laut dan tenggara dengan kecepatan terbesar adaiah 17 knot.

d. Geologi dan jenis Tanah

Menurut peta geologi Pulau Ambon yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian bahwa kondisi geologi di Kota Ambon pada umumnya berkarakteristik geologi yang dicirikan dengan batuan Aluviul (Qa), yang terdiri dan aluvial pantai, sungai dan rawa yang benbentuk pasir, tempung, lanau, kerikil, kerakal, dan sisa tumbuhan dan seluruh wilayah di daerah pesisir Kota Ambon terdiri dari batuan aluvium. Jenis ini pada dasarnya merupakan lapisan yang subur bagi tanaman pertanian. mengenai sebaran geologi di Kota Ambon.Di

Kota Ambon pada umumnya jenis tanah yaitu Jenis Tanah Dystropepts, memiliki fisiologi yang agak terlapuk, berwarna kecoklatan, bertekstur halus sampai sedang. Bersifat masam, mengandung batuan basalt dan andesit, batuan pasir, campuran batu dan lumpur dengan Tuf masam. Tipe ini merupakan tanah dengan tingkat kesuburan sedang pada lapisan atas yang harus dilindungi. Jenis tanah ini terdapat di seluruh Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Kel. Gatae



KAWASAN PESISIR KOTA AMBON



1:12.000



Selaras

Batas Kawasan

- Sungai
- Jalan
- Tanah Dystropeps

Jerita Tbnah

D. Iust. Citik

NUR ARFANY PNYAPC / 4E 09 042 031

Samudra

- 1 Ir P. Rahawati Farman M Si
- 2 Ir Israhudin Kooling M SA
- 3 Prasanti ST M El



Sumber:
Kantor BAPPENAS Kota Ambon
Citra Spialit Google Earth
- Hasil B. rny: Lapangan 2013



Universitas Pattimura
Fakultas Teknik
Jl. Veteran 45 Makassar
81134



1:12.200



Keterangan.

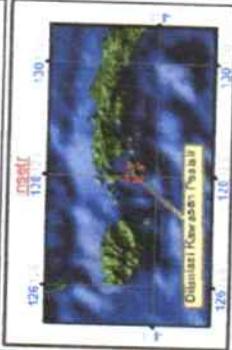
- Batas Kawasan
 - Sungai
 - Jalan
- Geologi**
- Alluvial Pantai
 - Alluvial Sungai, Rawa

Dibuat Oleh:

MIR ARFANY PAYAPO / 451 09 042 (31)

Revisi:

- 1 Ir. H. Rahawati Rahmas, M. Si
- 2 Ir. Dehendir Keddreg, M. DA
- 3 Ruzani, ET, M. Si



Skala:

Kantor BAPPEDA Kota Ambon
 - Ultra Street Google Earth
 - Ihasi Survey Lapangan 2011



Jurusan Teknik Geomatika
 Fakultas Teknik
 Universitas Islam 45 (Ar-Raniry)
 2011



4080,00 4090,00 4095,00 4100,00

KAWASAN PESISIR KOTA AMBON

e. Hidrologi

Hidrologi Kota Ambon meliputi kondisi air permukaan dan air tanah. Untuk selengkapnya, sebagai berikut :

1. Air Permukaan Air

permukaan dalam hal ini adalah air sungai dan mata air. di Kota Ambon terdapat beberapa aliran sungai (wai) yang cukup panjang, diantaranya Wai Ruhu (9,10 Km), Wai Batu Merah (4,25 Km), Wai Tomu (4,20 Km), Wai Batu Gajah (3,10 Km), Wai Tonahitu (6 Km), Wai Lela (7,8 Km), Wai Pia Besar (6 Km), Wai Lawa (9,5 Km) dan Wai Sikula di Desa Laha yang merupakan aliran sungai terpanjang 15,5 Km. Sungai-sungai tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk mencuci dan mandi, khususnya untuk sungai yang berada di wilayah pedesaan, sedangkan sungai-sungai yang berada di wilayah perkotaan kondisinya sudah tercemar karena dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan air limbah rumah tangga.

Selain sungai, sumber air baku lainnya adalah mata air (ada 8 lokasi), dua diantaranya sudah dimanfaatkan oleh PDAM Kota Ambon sebagai sumber air baku, yaitu mata air Wainitu dan Wai Pompa. Wainitu terietak di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe untuk daerah pelayanan sekitar pusat kota, sedangkan Wai Pompa telietak di Desa Halong Kecamatan Teluk Ambon

Baguala, untuk daerah pelayanan sekitar Desa Halong dan Desa Hative Kecil.

2. Air Tanah

Penduduk yang bermukim pada daerah-daerah yang relatif rendah, untuk kebutuhari sehari-harinya sebagian besar menggunakan air tanah dangkal berupa sumur gali, sumur pompa tangan atau pompa listrik. Air tanah dangkal pada daerah datar tersebut memiliki kedalaman muka air tanah yang bervariasi namun relatif rendah yaitu 1-5 meter. Namun kuaalitas air tanah dangkal tersebut pada umumnya kurang baik karena letaknya sangat dekat dengan pantai, maka air tanah dangkal tersebut kemungkinan terkena intruisi air laut, bahkan sebagian tercemar oleh bakteri. Semeritara untuk air tanah dalaftl banyak terdapat pada kedaiam lebih dari 50 meter dengan kuaalitas yang cukup baik.

f. Pola Penggunaan Lahan

Secara umum, penggunaan lahan pada kawasan Pesisir Kota Ambon dilatar belakangi oteh sejarah berkembangriya Kota Ambon sebagai kota pelabuhan yang dengan sendirinya memadikan kawasan pesisir sebagai kawasan terbangun yang disertai dengan fungsi-fungsi yang menunjang aktifitas kebutuhan.

Pola penggunaan lahan di Kota ambon terdiri dari kawasan pelabuhan, permukiman, perdagangan, kawasan pergudangan, perkantgran, peribadatan, kesehatan, pendidikan dan terminal.

Untuk lebih jeiasnya mengenai kondisi pola penggunaan lahan di kawasan Pesisir Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Penggunaan Lahan Pada kawasan Pesisir Kota
Ambon Tahun 2013

No	Penggunaan lahan	Luas (Km ²)
1.	Fasilitas Peribadatan	0,0102
2.	Fasilitas Permukiman	0,4659
3.	Fasilitas Perdagangan	0,1056
4.	Fasilitas Kesehatan	0,0012
5.	Fasilitas Pendidikan	0,0028
6.	Terminal	0,0074
7.	Pasar	0,0146
8.	Fasilitas Perkantoran	0,0159
9.	Pelabuhan	0,0733
10.	Pergudangan	0,0182
	Jumlah	0,7403

Sumber : Kec. Sirimmau Tahun 2013

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada kawasan pesisir kota ambon di dominasi oleh fasilitas permukiman dengan luas 0,4659 Km², hal ini terkait dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan lahan semakin besar. Sedangkan fasilitas yang paling kecil luasannya yaitu fasilitas kesehatan dengan luas 0,0 012 Km².

2. Karakteristik sosial kependudukan

a. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk yang ada di pesisir Kota Ambon dalam kurung waktu tahun 2008 – 2012 mengalami peningkatan yang tersebar di kelurahan Honipopu, Kelurahan Uritetu, Kelurahan Rijali, Desa Batu Merah. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5

Jumlah penduduk dan perkembangan penduduk di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau tahun 2008 – 2012

No	Kelurahan / Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Honipopu	5.555	5.779	5.919	6.139	6.719
2.	Uritetu	4.011	4.189	4.376	4.506	4.990
3.	Rijali	6.314	5.970	6.567	6.978	7.411
4.	Batu Merah	48.943	53.016	57.387	60.121	62.211
	Jumlah	64.823	68.954	74.249	77.744	81.351

Sumber : Kecamatan Sirimau 2013

Kecamatan Sirimau yang memiliki luas 8.681 Ha, tetapi untuk wilayah pesisir Kota Ambon hanya mencakup 4 (empat) kelurahan dengan luas wilayah 17,64 Km². Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan kepadatan penduduk di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Di Kawasan
Pesisir Kota Ambon Tahun 2012

No	Kelurahan/Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/ Km ²)
1	Honipopu	0,34	6.719	19.762
2	Uritetu	0,35	4.990	14.358
3	Rijali	0,28	7.411	26.468
4	Batu Merah	16,67	62.211	3.732
Jumlah		17,64	81.351	64.220

Sumber : BPS Kec. Sirimau Dalam Angka Tahun 2013

Dari data diatas, terlihat bahwa Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Batu Merah sebesar 62.211 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kelurahan Uritetu yang hanya berjumlah 4.990 jiwa. Berbeda dengan kepadatan penduduk di Kecamatan Sirimau, dimana kelurahan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah kelurahan Rijali dengan kepadatan 26.468 jiwa/Km² sedangkan kepadatan terendah Desa Batu Merah yang hanya berjumlah 3.732 jiwa/Km². Kepadatan penduduk yang tinggi di Kelurahan Rijali disebabkan karena terdapatnya pusat perdagangan dan jasa yang dengan sendirinya menarik masyarakat untuk menetap di kawasan tersebut.



KAWASAN

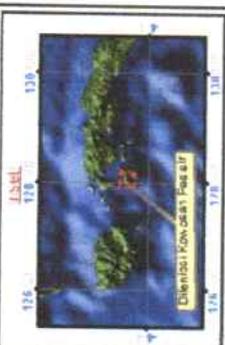
- Sawah Kerasan
- Sawah
- Sungai

Jumlah Persegi Panjang
Jumlah
Kepadatan Persegi Panjang
Jarak/Km²

Luas Melayah
Km²

Dibuat Oleh:
NUR AR-RANY DAYATO / 45 09 042 301

Referensi:
1. H. Rahmawati Rahuman, M.Si
2. Ir. Baharuddin Koddag, M.SA
3. Rosnerri, ST, M.Si



Sumber:
- Kantor - Kantor UIN Ar-Raniry
- Citra Satelit Google Earth
- Hasil Survey Lapangan 2013

Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota
Fakultas Teknik
Universitas Jember
2011



KAWASAN PESISIR KOTA AMBON

b. Sosial Budaya

Adapun sosial budaya yang terjadi di Pulau Ambon umumnya dan Di Kota Ambon pada khususnya terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Yang mana terlihat begitu banyaknya bahasa daerah yang ada di Pulau Ambon. Disisi budaya masyarakat Pulau Ambon umumnya dan Di Kota Ambon pada khususnya dikenal dengan istilah Pela-Gandong. Adat istiadat ini yang berlaku di masyarakat Pulau Ambon, dewasa ini berhubungan dengan waktu-waktu, tempat dan pertukaran generasi. Dan sejarah susunan masyarakat, letak, iklim, struktur rohani masyarakat telah mengakibatkan adat istiadat cenderung membedakan satu sama lainnya.

Yang dimaksud dengan Pela-Gandong adalah perserikatan antara satu negeri atau desa lain dalam Pulau Ambon. Disinilah merupakan budaya yang sangat erat di dalam masyarakat, walaupun berbagai agama tetapi sudah merupakan suatu perjanjian baik lisan maupun tulisan, dimana para pihak berjanji untuk tunduk pada perjanjian dimaksud sebagai dasar hukum bagi implementasinya dari waktu ke waktu.

Harapan terhadap budaya Pela-Gandong ini tidaklah terietek pada masalah kerukunan hidup umat beragama saja, tetapi walaupun Hal itu juga amat berguna, melainkan lahimya

pemahaman bahwa kelangsungan hidup rukun antara umat beragama amat bergantung kepada kemampuan untuk belajar sekaligus memberikan jawaban antisipatif terhadap perkembangan yang sedang dan yang akan dihadapi.

3. Karakteristik Fisik Pantai

Dalam suatu kawasan pesisir terdapat satu atau lebih ekosistem dan sumber daya pesisir. Ekosistem pesisir dapat dibedakan atas ekosistem pesisir yang bersifat alamiah dan ekosistem buatan. Yang termasuk dalam ekosistem alamiah adalah hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, pantai berpasir, pantai berbatu, estuaria, sedangkan ekosistem yang bersifat buatan yaitu terdiri dari tambak, sawah, pasang surut, pariwisata, industri dan permukiman.

kota Ambon ditinjau dari sudut oceanografi memiliki perairan, luas perairan 132.471 Ha (81,07 %). Luas perairan tersebut cukup luas bila dimanfaatkan.

a. Tinggi Gelombang

Gelombang merupakan salah satu parameter oceanografi fisika yang sangat mempengaruhi kondisi pantai. Gelombang sebagai parameter yang sangat penting dalam suatu survey pantai dimana penyebab pembentuknya adalah akibat angin, letusan gunung api bawah laut, peristiwa tsunami dan akibat

pergerakan tata surya. Data hasil pengukuran di lokasi survey pada kawasan pesisir kota ambon berkisar antara 1,5 – 2,5 m/det.

b. Arus Pantai

Pengukuran arah dan kecepatan arus pada survey pantai dimaksudkan untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang dampak hembusan angin dan diasumsikan arah arus mengikuti (searah) dengan pola sebaran angin. Di samping itu untuk mengetahui kemungkinan arus turbulensi dan pola arus menyebabkan proses sedimentasi pada daerah tersebut. Hasil pengukuran arus pada kawasan pesisir kota ambon berkisar antara 0,13 – 0,93 m/det dengan arah 200 -310 sedangkan arus terjadi di pantai pada umumnya adalah arus sudut pantai.

c. Pasang surut

Pasang surut yang dimaksudkan untuk mengetahui tipe pasang surut yang terjadi dalam lokasi tertentu dalam sehari semalam. Dari hasil pengamatan pasang surut yang dilakukan menunjukkan bahwa daerah survey memiliki tipe pasang surut campuran, yaitu tipediurnal dan semidiurnal

d. Bathimetri

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kemiringan pantai terhadap lautan. Dari hasil dan pengamatan yang dilakukan,

kelandaian pantai pada kawasan kota Ambon secara umum untuk lokasi survey memiliki pantai yang terjal.

Kedalaman laut adalah bervariasi, pada beberapa lokasi di sekitar kawasan pesisir Kota Ambon terdapat tingkat kedalaman yang tidak terlalu dalam, sekitar 10 meter sampai pada jarak sekitar <500 meter dari garis pantai.

e. Dinamika Proses Pantai

Secara umum kawasan pesisir pantai Kota Ambon yang luas perairan 132.471 Ha (81,07%) kenampakan garis muka pantainya umumnya adalah laut terbuka, namun ada beberapa yang berbentuk teluk, yang keseluruhannya di kawasan pesisir Kota Ambon.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dilokasi survey, kondisi sepanjang pantai Kota Ambon mempunyai karakteristik yang khas, dimana hampir seluruh kawasan pantai tersebut jarang ditumbuhi mangrove. Hal ini disebabkan karena perubahan fisik ruang kota yang mempengaruhi ke kawasan pesisir pantai.

3. Ekosistem Wilayah Pesisir Kota Ambon

Ekosistem pesisir memiliki struktur komunitas dan tipologi yang berbeda dengan ekosistem lainnya. Ekosistem pesisir ada yang secara terus menerus tergenangi air dan ada pula yang hanya sesaat. Ekosistem pesisir dapat bersifat alamiah (natural)

atau buatan (man made). Ekosistem alamiah antara lain mangrove, terumbu karang, padang lamun, pantai berpasir, pantai berbatu, estuaria, laguna dan delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa tambak, kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan permukiman.

a. Ekosistem Mangrove

Komunitas mangrove menyenangi perairan pantai yang terlindung, karenanya komunitas tersebut hampir tidak dapat tumbuh dengan baik di perairan pantai Teluk Ambon Luar (TAL) karena kondisi perairan pantai yang langsung dipengaruhi sifat oseanis dan hampir tidak terlindungi. Untuk komunitas mangrove di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau tidak ada karena dilain sisi dipengaruhi oleh kondisi perairan pantai yang langsung dipengaruhi sifat oseanis dan juga pada kawasan pesisir tersebut sudah dibangun oleh berbagai sarana dan dipengaruhi oleh kegiatan darat berupa pembuangan limbah ke perairan pantai Teluk Ambon.

b. Ekosistem Padang Lamun

Komunitas padang lamun yang merupakan suatu ekosistem bahari yang sangat menunjang produktivitas perairan. Lamun merupakan jenis tumbuhan yang sudah sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan laut, sehingga mampu

melaksanakan penyerbukan dengan perantaraan air laut. Ekosistem padang lamun juga tidak dapat ditemui di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau sama halnya dengan ekosistem mangrove, karena melihat kedalam air laut yang cukup dalam sehingga komunitas padang lamun tidak mampu beradaptasi di lingkungan tersebut juga terganggunya oleh aktivitas yang ada di daerah daratan.

c. Ekosistem Terumbu Karang

Terumbu karang merupakan bagian dari sumber daya hayati yang mana di jaga dan lestarian sebagai kekayaan pesisir. akibat perkembangan kawasan pesisir Kec. Sirimau sangat berpengaruh terhadap keberadaan terumbu karang terutama bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya.

Adapun jenis karang yang terdapat di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau adalah jenis spesies Acroporidae, Faviidae, dan Poritidae. Dari tumbuh koloni, maka Acroporidae bercabang memiliki kelimpahan spesies, sementara untuk karang batu non Acroporidae, ternyata karang bercabang dan karang memiliki spesies tertinggi dibanding bentuk tumbuh yang lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Maluku, menunjukkan bahwa dalam dekade terakhir telah menunjukkan telah mengalami kerusakan yang cukup signifikan

yang mana kerusakan ini terjadi pada daerah seluas 1,52 Km². Kerusakan terumbu karang di kawasan pesisir Kota Ambon diakibatkan oleh ulah manusia yang mana selalu membuang limbah di daerah pesisir serta kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan.

d. Ekosistem Estuaria

Ekosistem estuaria merupakan ekosistem pertemuan dan pencampuran antara perairan air tawar dan perairan laut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ekosistem estuaria di Teluk Ambon Luar (TAL) berada di 3 (tiga) muara (sungai) Wai Batu Merah, Wai Tomu dan Way Batu Gajah yang senantiasa bersosiasi dengan bentuk - bentuk lahan pesisir seperti pantai berpasir, pantai berbatu laguna dan delta.

4. Dampak Perkembangan Kawasan pesisir Terhadap Daya Dukung

Pemanfaatan sumber daya pesisir di satu sisi berdampak pada kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan penyediaan lapangan pekerjaan seperti penangkapan ikan secara tradisional, budi daya tambak, penambangan terumbu karang, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam secara terus menerus dan berlebihan akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan ekosistem pesisir.

Ada beberapa masalah yang terjadi dalam perkembangan di kawasan pesisir Kota Ambon antara lain:

a. Pencemaran

Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Masalah pencemaran sebagian besar disebabkan karena ulah manusia, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat serta perilaku masyarakat yang membuang sampah atau limbah rumah tangga yang langsung ke laut itu sudah membudaya.

b. Abrasi Pantai

Ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai, yaitu : (1) proses alami (karena gerakan gelombang pada pantai terbuka), (2) aktivitas manusia. Kegiatan manusia tersebut misalnya kegiatan penebangan hutan (HPH) atau pertanian di lahan atas yang tidak mengindahkan konsep konservasi telah menyebabkan erosi tanah dan kemudian sedimen tersebut dibawa ke aliran sungai serta diendapkan di kawasan pesisir dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir telah terjadi abrasi pantai dengan luasan sekitar 2 sampai 5 m/tahun. Ini

menunjukkan bahwa abrasi berpengaruh besar terhadap perkembangan.

c. Erosi

Erosi terjadi akibat proses pengikisan lapisan atau pelapukan batuan. Erosi yang terjadi pada kawasan pesisir Kota Ambon, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai sebanyak 0,59 m dalam tiap tahunnya dengan luas area yang terkena erosi sebesar 362 m².

d. Kualitas Air Laut

Untuk mengetahui dampak dari perkembangan kawasan pesisir Kota Ambon, maka diperlukan pengukuran terhadap kualitas air laut pesisir Kota Ambon. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara, telah menunjukkan bahwa kualitas air laut telah mengalami pencemaran dengan luas yang tercemar 1,56 Ha. Kondisi ini berdampak pada degradasi pesisir Kota Ambon

C. Analisis Aspek Fisik Kawasan

1. Letak Geografis.

Kota Ambon mempunyai posisi yang strategis, karena merupakan pusat kegiatan yang ada di provinsi Maluku baik Pemerintahan, perdagangan dan jasa. Karakteristik Kota Ambon adalah geografis wilayah pesisir yang terletak di teluk Kota Ambon

bagian luar sehingga pola perkembangan berada di daerah pesisir dan mengakibatkan transportasi wilayah memegang peranan penting terutama sistem transportasi laut.

Dilihat dari geografis wilayah kawasan pesisir Kota Ambon dengan perkembangan kegiatan wilayahnya, tentunya akan mempengaruhi potensi dan penataan kegiatan di wilayah lainnya. Beberapa kelebihan yang dimiliki Kota Ambon sebagai berikut.

- a. Dapat mengakses ke provinsi Maluku maupun provinsi di luar Maluku dengan cepat karena posisinya sebagai pusat kota.
- b. Dapat mengakses wilayah Kota Ambon bagian utara dan timur maupun barat dengan mudah dan lancar karena memiliki kelengkapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Melihat dari letak dan fungsi Kecamatan Sirimau sebagai kawasan pemerintahan dan perdagangan jasa, maka perlu dilakukan suatu penataan kota yang sesuai dengan daya dukung lingkungan pada Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau yang telah menimbulkan kesemerautan di suatu sudut pusat kota.

Dari letak geografis, maka Kota Ambon merupakan kawasan lalu lintas pelayanan nasional maupun internasional,

sehingga menjadikan modal besar untuk membangun wilayah Kota Ambon pasca konflik kerusuhan.

2. Topografi dan kemiringan lereng.

Kecamatan Sirimau yang berada di wilayah pesisir Kota Ambon memiliki topografi dan kemiringan lereng di Kota Ambon yaitu 0 – 50 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng $3,36^{\circ}$. untuk keadaan topografi di Kota Ambon secara umum dapat dikelompokkan kedalam topografi yang relatif datar dengan ketinggian 0 -20 meter dan kemiringan 0 – 10 % terdapat di kawasan sepanjang pantai dengan radius antara 0 – 300 meter dari garis pantai. Serta memiliki wilayah perairandan daratan yang kondisinya tersebut sangat memungkinkan perkembangan kawasan pesisir Kecamatan Sirimau untuk fasilitas permukiman, perdagangan maupun fasilitas pemerintahan . kemiringan lereng dan bentuk lereng yang pada umumnya berbentuk cembung, sehingga kenampakan pantai terjal dan curam serta pantai datar tampak seperti jalur yang sampai sepanjang pantai, maka tidak semua tempat memiliki kemiringan lereng yang sama.

Melihat kondisi topografi maka keberadaan Kota Ambon yang relatif datar dan landai dapat memberikan dampak pada pasang air laut yang akan membahayakan kawasan pesisir.

3. Klimatologi

Iklm yang terjadi pada Kota ambon sama dengan iklim yang terjadi disemua wilayah di Kota Ambon dimana adalah iklim laut tropis dan iklim musim. Sehubungan dengan itu iklim Kota ambon sangat dipengaruhi oleh lautan dan berlangsung bersamaan dengan iklim musim, yaitu musim barat atau utara dan musim timur atau tenggara pergantian musim selalu diselingi dengan musim pancaroba yang merupakan transisi kedua musim tersebut.

Curah hujan yang terjadi di Kota Ambon mencapai 3.674 mm dari 208 hari hujan selama setahun, tetapi pada tahun 2009 curuh hujan hanya 2.854 mm dari 231, berarti dalam lima tahun terakhir jika ditinjau perbulan, curah hujan dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan mei sebesar 540,3 mm dengan hari hujan sebesar 25 hari dan terendah pada bulan februari dengan kecerahan hujan sekitar 91.5 mm dari 13 hari hujan.

Berdasarkan data terakhir tahun 2012 kondisi temperatur rata – rata di Kota Ambon sekitar 26,5 °C dengan kisaran suhu minimum 24,4°C dengan suhu maksimum 30,5 °C dengan kelembapan udara sekitar 81% dan lama penyinaran matahari rata – rata 40% . kecepatan angin rata – rata 4 knot dan

sebagian besar bertiup arah barat laut dan tenggara dengan kecepatan 17 knot.

4. Geologi dan Jenis Tanah

Menurut peta geologi yang dikeluarkan oleh departemant Geologi, departement pertambangan dan dan energi bahwa kondisi geologi di Kota ambon pada umumnya berkarakteristik geologi yang dicirikan dengan batuan aluvial (Qa) ,yang terdiri aluvial pantai dan sungai yang berbentuk pasir , lempung, lanau, kerikil dan sisa tumbuhan dari seluruh wilayah pesisir Kota Ambon. Jenis ini pada dasarnya merupakan lapisan yang subur bagi tanaman pertanian.

Kota Ambon memiliki jenis tanah yang tidak beda jauh dengan jenis tanah yang basa wilayah Kota Ambon yaitu Dystopepts. Jenis tanah Dystopepts, memiliki fisiologi yang agak berlapuk, berwarna kecoklatan, bertekstur halus sampai sedang bersifat masam, mengandung batuan basalt dan andesit, batuan pasir bercampur batu dan lumpur tuf masam. Tipe ini merupakan tanah dengan tingkat kesuburan sedang pada lapisan atas yang harus dilindungi. Kondisi tersebut baik dari keberadaan geologi dan jenis tanah yang baik dalam pengembangan untuk kawasan budidaya seperti tambak dan jasa – jasa dll.

5. Hidrologi

Berdasarkan hasil survei lapangan yang terkait dengan kondisi hidrologi kawasan pesisir Kecamatan Sirimau terbagi dalam 2 jenis yaitu air permukaan yakni air sungai dan air tanah dibawah permukaan yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam.

Penduduk yang bermukim di sepanjang sungai dikawasan pesisir pada awalnya memanfaatkan sungai sebagai keperluan mandi dan cuci. Namun dengan semakin menurunnya kualitas air sungai pemanfaatan tersebut makin berkurang, saat ini sungai lebih banyak digunakan sebagai saluran drainase dan tempat pembuangan limbah rumah tangga, jika tidak dikendalikan akan semakin memperburuk kualitas air sungai. Sedangkan sumber air baku yang potensial yang digunakan adalah sumber air yang berada di kecamatan nusaniwe yang sudah dikelola oleh pihak PDAM untuk pelayanan daerah sekitar Kota Ambon.

D. Analisis aspek Kependudukan

Aspek kependudukan dalam proses perencanaan merupakan dasar dalam penentuan atau penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Analisis kependudukan akan menggambarkan penilaian mengenai kecenderungan

perkembangan, penyebaran dan perkiraan dimasa yang akan datang

1. Analisis Perkembangan Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk pada Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimaudalam kurun waktu 5 tahun terakhir maka dapat diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2032, pada tahun 2010 yang mengalami peningkatan yang paling tinggi jumlah penduduknya yaitu dari 75.611 jiwa dan pada 2012 meningkat menjadi 81.351 jiwa. Dengan menggunakan Metode Geometrik (Regresi Bunga Berganda) dapat proyeksi jumlah penduduk pada Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau tahun 2032 sebanyak 121.213 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1.

2. Analisis Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk di beberapa kelurahan dalam penelitian adalah memusat, menyebar dan terdistribusikan di tiap – tiap unit lingkungan, karena dipengaruhi oleh mata pencaharian dan penggunaan lahan yang masih di dominasikan oleh permukiman dan perdagangan. Keberadaan sarana dan prasarana yang ada dalam penelitian, sudah cukup memadai, sehingga untuk saat adalah peningkatan dang kebutuhan yang mendesak.

E. Analisis sosial masyarakat

Peristiwa konflik yang terjadi telah memberikan pelajaran bagi masyarakat Kota Ambon dalam membina hubungan interaksi sosial budaya dalam masyarakat. Kehidupan kebersamaan dan persaudaraan dalam masyarakat yang didukung semangat budaya orang maluku. Budaya orang ambon merupakan pilar – pilar sosial budaya yang harus terus dikembangkan , untuk mewujudkan hal – hal tersebut dibutuhkan beberapa upaya antara lain :

- a. Pendiikan generasi muda yang terpadu dan multi–kelompok agar mempercepat kebersamaan antar warga Kota Ambon
- b. Meningkatkan interaksi sosial budaya melalui lomba, olahraga dan kesenian
- c. Menciptakan ruang publik yang banyak dan luas untuk kegiatan interaksi sosial antar masyarakat
- d. Penegakan keamanan, ketertiban, hukum yang adil dan transparan bagi para pelanggar hukum.

F. Analisis pola penggunaan lahan

Melihat dari pola penggunaan lahan yang terjadi di kawasan pesisir Kecamatan Sirimau memperlihatkan bahwa pola pnggunaan lahan didominasi oleh kawasan perdagangan yang penyebarannya mengikuti pola jaringan jalan disepanjang jalan Kota ambon dan terdapat sebuah pasar yang terletak diatas laut serta

perkembangan permukaan masyarakat pada sepanjang pesisir atau daratan yang tingkat kemiringan lahannya cukup landai.

G. Analisis Dampak Perkembangan Kawasan Pesisir Kota Ambon

Pemanfaatan sumber daya pesisir di satu sisi berdampak pada kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam secara terus menerus dan berlebihan akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan ekosistem pesisir.

Ada beberapa masalah yang terjadi dalam pembangunan di kawasan pesisir Kota Ambon antara lain

1. Erosi

Erosi adalah salah satu faktor yang merupakan dampak perkembangan yang terjadi di kawasan pesisir Kota Ambon. Erosi telah menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai sebanyak 0,59 meter ditiap tahun dengan luas area merupakan yang terkena erosi sebesar 362 m². dari data diatas menunjukkan bahwa erosi merupakan salah satu dampak dari perkembangan kawasan pesisir Kota Ambon. Untuk menghindari erosi yang terjadi berkepanjangan di kawasan Pesisir Kota Ambon maka diperlukan upaya pemeliharaan dan pengendalian ruang pesisir Kota Ambon

2. Abrasi Pantai

Abrasi pantai disebabkan oleh alam (arus ombak yang besar dan berlangsung terus menerus hingga menyebabkan pengikisan batuan) atau disebabkan oleh ulah manusia yang membuat lingkungan binaan di sekitar pantai tanpa memiliki konsep perencanaan yang jelas. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir ini telah terjadi abrasi pantai, dengan luasan yakni sekitar 2 sampai 5 m/tahun, ini menunjukkan bahwa abrasi pantai berpengaruh.

3. Penurunan kualitas Air Laut

Kegiatan masyarakat pada kawasan pesisir Kota Ambon yang berlebihan tanpa memperhatikan ekosistem yang terdapat di pesisir berdampak pada menurunnya kualitas air laut. Kegiatan masyarakat yang dimaksud yakni pembuangan limbah dan sampah yang langsung pada daerah pesisir.

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa kualitas air laut telah mengalami pencemaran dengan luas area yang tercemar yakni 1.56 Km². Dengan demikian diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas air guna untuk menghindari pencemaran dan penurunan kualitas air laut.

4. Rusaknya Terumbu Karang

Komunitas ikan karang merupakan salah satu komponen penyusun ekosistem terumbu karang, disamping komponen utama karang batu. Kehadiran ikan karang di suatu ekosistem terumbu karang sangat penting, dilihat dari aspek ekologi dan ekonomi. Aspek ekologi, ikan karang memegang peranan penting yang salah satunya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Aspek ekonomi ikan karang berfungsi sebagai sumber pangan hewani, ikan hias dan pendapatan yang sangat potensial bagi kehidupan manusia.

Tingginya aktifitas dari nelayan tradisional yang seringkali membuang jangkar perahu, penangkapan ikan menggunakan bom dan racun sianida untuk mempercepat hasil tangkapan. Hal ini mempengaruhi kerusakan terumbu karang yaitu limbah minyak dari kapal atau speed boat yang bersandar pada Kelurahan Uritetu dan Kelurahan Batu Merah.

Rehabilitasi terumbu karang melalui kegiatan transpalantasi sebagai upaya pengembangan terumbu karang. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan yang berlebihan, maka diperlukan sikap peduli lingkungan dari masyarakat pesisir dengan mempertimbangkan aspek ekologi yaitu melestarikan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

H. Analisis Perkembangan Kawasan Pesisir Terhadap Daya Dukung Lingkungan

Salah satu faktor yang berpengaruh besar dan juga sangat dipengaruhi oleh pembangunan adalah faktor sumber daya alam dan daya dukung lingkungan. Dengan terbatasnya lahan perkotaan dan sumberdaya di darata serta meningkatnya jumlah penduduk kota ambon, maka banyak kegiatan yang dialihkandari daratan ke kawasan pesisir sehingga sering timbulnya konflik. Konflik dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir oleh msayarakat pada kawasan pesisir kota ambon, pada akhirnya menimbulkan kerusakan ekosistem sepertierosi, pencemaran lingkungan dan degradasi lahan.

1. Daya Dukung Ekologis Kawasan Pesisir Kota Ambon

Dalam konteks ekologis, kawasan pesisir dan laut kota ambon sangat memiliki produktivitas yang tinggi, maslah yang biasa terjadi dalam pemanfaatan sumber daya pesisir berkaitan erat dengan perilaku masyarakat pengguna sumber daya pesisir. Dalam pemanfaatan sumber daya pesisir kota ambon cenderung berlebihan, hal ini menyebabkan tidak seimbangya laju pemanfaatan dan laju pemulihan sumber daya tersebut. Dengan demikian dbutuhkan pengelolaan sumberdaya pesisir

kota ambon yang berkelanjutan di perlukan upaya terpadu untuk daya dukung lingkungan.

2. Daya Dukung Ekonomis Kawasan Pesisir Kota Ambon

Banyak pembangunan ekonomi pada kawasan pesisir Kota Ambon yang berlangsung tanpa perencanaan dan pemahamanyang baik dan benar sehingga mengakibatkan masalah sosial ekonomi lingkungan yang muncul di kawasan pesisir Kota Ambon akibatnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat

i. Analisis Kesesuaian Lahan Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau Terhadap Perkembangan wilyah Pesisir

Analisis/klasifikasi kesesuaian lahan adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis dengan jalan mengelompokkannya Dengan adanya klasifikasi kesesuain lahan diharapkan perlakuan yang akan diberikan kepada lahan di Kawasan Pesisir Kota Ambon dapat di arahkan sedemikian rupa sesuai dengan kemampuannya sehingga daya dukung dapat dipelihara dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan lestari.

Analisis Superimpose (Overlapping) Lahan Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau

Analisis Superimpose (Overlapping) merupakan upaya yang di lakukan untuk mengetahui potensi suatu lahan. Dari analisis ini

akan didapatkan penilaian terhadap potensi lahan yang nantinya akan menjadi acuan untuk menentukan pemanfaatan lahan yang benar, ada tiga faktor yang mempengaruhi criteria penetapan fungsi lahan yang di nilai sebagai penentu kemampuan lahan yaitu :

Tabel 4.10
Skoring Kelas lereng

Kelas lereng	Kemiringan lereng (%)	Kategori	Bobot
1	0 – 8	Datar	20
2	8 – 15	Landai	40
3	15 – 25	Agak curam	60
4	25 – 45	Curam	80
5	>45	Sangat curam	100

Sumber : Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Dirjen Cipta karya Depatemen PU, 1992

Tabel 4.11
Skroring Kelas Jenis Tanah

Kelas tanah	Kelompok jenis tanah	Kepekaan Terhadap Erosi	Bobot
1	Aluvial Tanah, Planassol, Hidromart Kelabu, Litosol Air Tanah	Tidak Peka	15
2	Latosol	Agak Peka	30
3	Brown Forest Sail / Dydropepts, Non calcic	Kurang peka	45
4	Andosol, Podsalik, Laterictic Gramusol	Peka	60
5	Regasol, Litosoln Organasal, Renzine	Sangat Peka	75

Sumber : Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Dirjen Cipta karya Depatemen PU, 1992

Tabel 4.12
Skoring Intensitas Hujan

Kelas curah hujan	Kisaran curah hujan mm/hari hujan	Kategori	Bobot
1	9 – 13,6	Sangat Rendah	10
2	13,6 – 20,7	Rendah	20
3	20,7 – 27,7	Sedang	30
4	27,7 – 34,8	Tinggi	40
5	>3,8	Sangat Tinggi	50

Sumber : Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Dirjen Cipta karya Depatemen PU,1992

1. Kelerengan

Kelerengan dapat memberikan gambaran tingkat stabilitas terhadap kesesuaian lahan. Semakin terjal lereng maka potensi untuk terjadinya gerakan tanah dan batuan akan semakin besar, walau jenis batuan yang menempatnya cukup berpengaruh untuk tidak terjadinya longsor. Data yang diperoleh Dari hasil survey, kelerengan pada kawasan pesisir kota ambon terbagai atas 2 yaitu 0-2 % yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut datar dan 2-10% yang menunjukkan lokasi tersebut landai.

2. Jenis Tanah

Jenis Tanah dapat memberikan gambaran tingkat stabilitas terhadap kesesuaian lahan. Jenis tanah juga dapat digunakan untuk melihat suatu kesesuaian suatu lahan walau jenis tanah yang menempatinnya cukup berpengaruh untuk suatu kesesuaian lahan. Dari data yang diperoleh kawasan pesisir Kota Ambon memiliki jenis tanah Dydropepts / Brown Forest Soil.

3. Curah Hujan

Faktor intensitas curah hujan mempengaruhi analisis kemampuan lahan untuk penetapan fungsi lahan suatu kawasan berdasarkan intensitas curah hujan yang di hitung dalam satuan mm/hari. Dari data yang diperoleh intensitas curah hujan pada kawasan pesisir Kota Ambon yaitu 0 - 13,6 yang menunjukkan intensitas curah hujan pada kawasan pesisir Kota Ambon sangat rendah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan dari hasil analisis kondisi fisik dasar (Batuan dan kelerengan, kepekaan tanah serta intensitas curah hujan), maka perhitungan skor lokasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut;

- Penentuan nilai kelas masing-masing wilayah
- Setiap nilai kelas dikalikan dengan bobotnya masing-masing
- Hasil pembobotan dijumlahkan untuk mendapatkan bobot lokasi.

Parameter tersebut digunakan untuk mengarahkan alokasi pemanfaatan lahan di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau untuk masing-masing lingkungan perkotaan, sehingga memberikan gambaran tentang potensi pengembangan masing-masing lingkungan.

Besarnya jumlah nilai skor tersebut merupakan nilai skor kemampuan lahan untuk masing-masing satuan lahan, kemudian setelah skor di jumlahkan maka di tetapkan penggunaan lahan pada setiap kawasan dengan kriteria :

- Kawasan Fungsi Lindung dengan skor kemampuan lahannya besar >175
- Kawasan Penyangga dengan skor kemampuan lahan yang besarnya 125-174
- Kawasan Fungsi Budidaya dengan skor kemampuan lahannya < 124

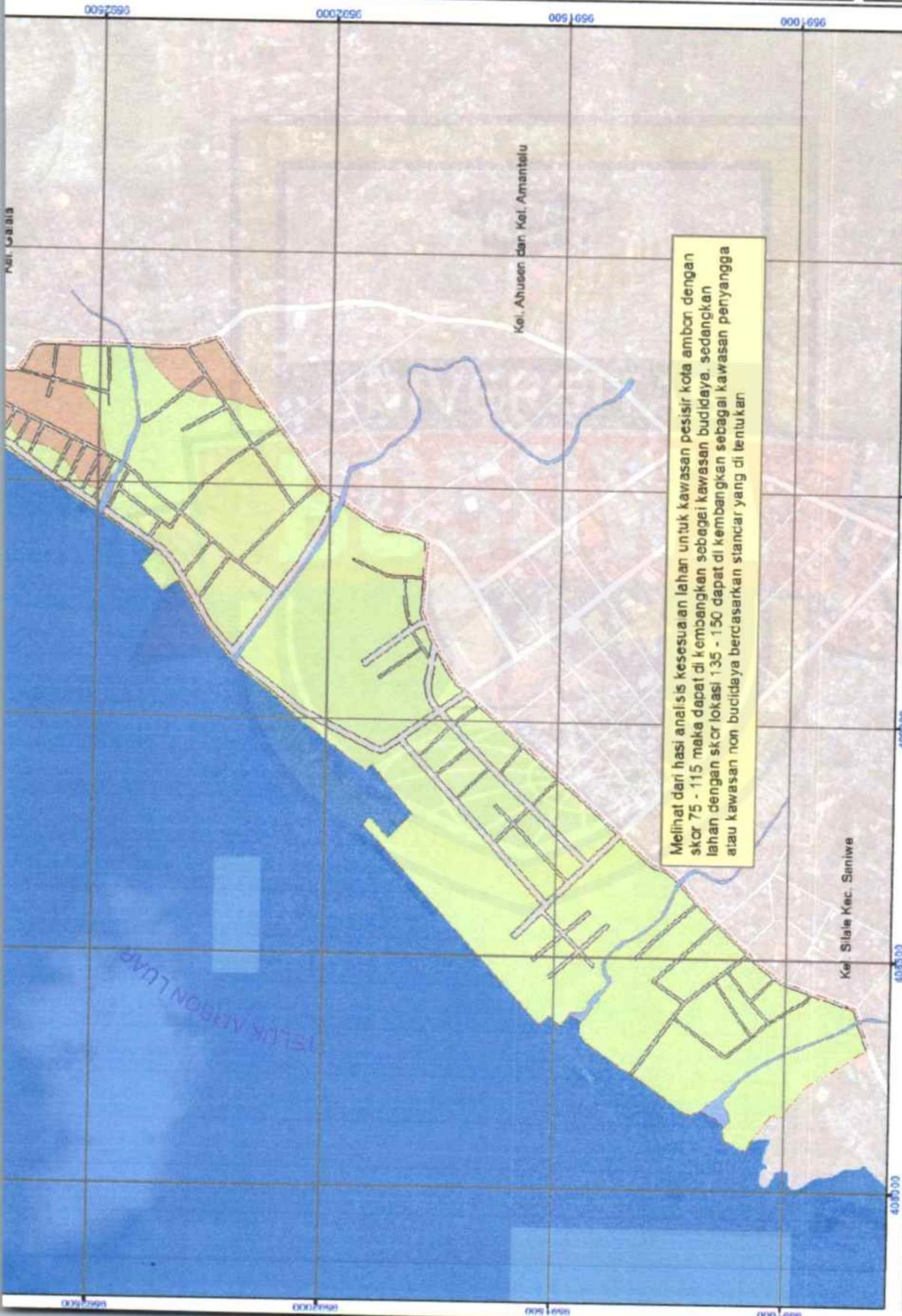
Hasil analisis kesesuaian lahan di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Hasil analisis skor lokasi arahan kesesuaian lahan di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau sebagai berikut:

Tabel 4.13
Analisis Skor Lokasi Kesesuaian Lahan
Di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau

No	Kelurahan	Variabel	Nilai		Bobot	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kelurahan Honipopu	Lereng	1	20	20	20
		Jenis Tanah	3	45	15	45
		Curah Hujan	1	10	10	10
		Indeks Lokasi				
2	Kelurahan Uritetu	Lereng	1	20	20	20
		Jenis Tanah	3	45	15	45
		Curah Hujan	1	10	10	10
		Indeks Lokasi				
3	Kelurahan Rijali	Lereng	3	20	60	60
		Jenis Tanah	3	45	15	45
		Curah Hujan	1	10	10	10
		Indeks Lokasi				
4	Desa Batu Merah	Lereng	3	60	20	60
		Jenis Tanah	3	45	15	45
		Curah Hujan	1	10	10	10
		Indeks Lokasi				

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2013

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada peta berikut ini, peta ini merupakan hasil overlay dari peta kelerengan, peta jenis tanah, Geologi dan peta curah hujan setelah memberikan bobot masing-masing. Berdasarkan overlay analisis peta jenis tanah, kelerengan dan curah hujan di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau, Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau memiliki bobot yaitu 75 -115.



Melihat dari hasil analisis kesesuaian lahan untuk kawasan pesisir kota ambon dengan skor 75 - 115 maka dapat di kembangkan sebagai kawasan budidaya, sedangkan lahan dengan skor lokasi 135 - 150 dapat di kembangkan sebagai kawasan penyangga atau kawasan non budidaya berdasarkan stianciar yang di tentukan

KAWASAN PESISIR KOTA AMBON

- Keterangan.**
- Batas Kawasan
 - Jalan
 - Sungai
- Skor**
- 115
 - 75

Dibuat Oleh:

HUR. ARTANY DAYADO : 45 09 042 031

Pembimbing:

1. Ir. H. Fahrudin Dahman, M. Sc.
2. Ir. B. H. Sidiq Koding, M. Sc.
3. Ketrastasi, S1, IRTS



Sumber:

- Kantor BAFPEK Kota Ambon
- Citra Satelit Google Earth
- Hasil Survei Lapangan 2013



Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota
 Fakultas Teknik
 Universitas Islam Maluku
 X.14

B. Arahan Pengembangan Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau Terhadap Daya Dukung Lingkungan.

Arahan pengembangan Kawasan Pesisir Kota Ambon merupakan suatu upaya untuk menentukan zona kawasan di Kawasan Pesisir Kota Ambon dengan berdasarkan pada tingkat kesesuaian lahan.

Arahan pengembangan Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau dibagi beberapa arahan pengembangan seperti berikut:

1. Arahan Pengembangan kawasan Perdagangan dan jasa

Arahan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau, dimaksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana perdagangan yang penempatannya berdasarkan kepada arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon. Hasil analisis kesesuaian menunjukkan bahwa kawasan perdagangan dapat dikembangkan pada Kelurahan Uritetu Dan Kelurahan Rijali.

2. Pengembangan Kawasan Permukiman

Arahan pengembangan kawasan permukiman di Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau dilakukan agar dalam pengembangannya tidak berakibat pada terjadinya konflik pemanfaatan ruang. Pengembangan kawasan permukiman dapat dilakukan pada lahan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek lainnya. Dengan demikian dalam

pengembangannya dapat dilakukan pada kawasan yang telah ditetapkan. Pengembangan kawasan permukiman diarahkan ke Kelurahan Rijali dan Desa Batu Merah dengan mempertimbangkan guna lahan eksisting yang telah ada

3. Arah Pengembangan Kawasan Pelabuhan

Pelabuhan merupakan titik simpul dari mata rantai sistem transportasi serta pintu gerbang (*gateway*) khususnya bagi transportasi laut dalam rangka kegiatan lalu lintas barang, pergerakan penumpang. Dengan demikian pelabuhan mempunyai peran dan fungsi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Melihat peranannya tentunya pelabuhan perlu dikembangkan di kawasan pesisir Kota Ambon

Dalam konteks pengembangan Kawasan Pesisir Kecamatan Sirimau, tentunya keberadaan Pelabuhan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang. Untuk lokasi arahan pengembangan kawasan pelabuhan dapat diarahkan pada kelurahan Honipopu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan terkait dengan upaya untuk mengidentifikasi dampak perkembangan kawasan pesisir kota ambon terhadap daya dukung lingkungan dan bagaimana arahan pengembangan berdasarkan kesesuaian lahannya, maka di tarik kesimpulan yakni diantaranya sebagai berikut :

1. Dari hasil dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak dari perkembangan kawasan pesisir Kota Ambon yaitu Pencemaran, Abrasi Pantai, erosi dan Penurunan Kualitas Air Laut.
2. Hasil analisis diketahui bahwa Kawasan pesisir Kota Ambon dapat diarahkan beberapa jenis kegiatan pemanfaatan ruang yakni diantaranya adalah pengembangan kawasan Permukiman, kawasan perdagangan dan jasa dan Perkembangan Pelabuhan.

B. Saran

Adapun saran yang ditawarkan oleh penulis dalam upaya Perkembangan Kawasan Pesisir Kota ambon dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak yang terlibat dalam Perkembangan Kawasan Pesisir Kota ambon termasuk pemerintah dan masyarakat yakni sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Kota Ambon Dalam Upaya mengatasi Perkembangan Kawasan Pesisir Kota Ambon Perlu adanya aturan tentang pemanfaatan lahan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah.
2. Dalam hal untuk menjaga keseimbangan dalam upaya arahan pengembangan di kawasan Pesisir Kota Ambon tentunya harus disertai dengan adanya konsep pengendalian pemanfaatan lahan sebagai alat kontrol untuk mewujudkan pemanfaatan ruang di Kawasan pesisir Kota Ambon yang aman, nyaman, tertib dan berkelanjutan.
3. Bagi mahasiswa yang melanjutkan penelitian yang sama tentang perkembangan kawasan pesisir terhadap daya dukung lingkungan bisa menjadi bahan pertimbangan atau referensi dan dasar kebijakan untuk pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Bengen, D. G. 2002. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan. Bogor: IPB.
- Badan Pusat Statistik Kota Ambon, 2013 Ambon Dalam Angka 2012
- Dahuri. 2001. Pengolahan Wilayah Pesisir di Indonesia. Kanisius. Yogyakarta.
- Dahuri, Rokhmin. 2003, Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Dahuri, R, dan kawan-kawan, (2001), Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Etika Resti Utami, 2012, *analisis dampak pengembangan kawasan pesisir Kota temate Terhadap kerusakan Lingkungan*, skripsi Universitas 45 (tidak dipublikasikan), Makassar.
- Nybakken, J.W.1992. Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologi. Jakarta: Gramedia
- Seanger .1983. Global Status of Mangrove Ekosistem, IUCN Commision and Ecology Papers, No.3. 1983.
- Republik Indonesia, 2007. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sekretariat Negara, Jakarta
- Republik Indonesia, 2007. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sekretariat Negara, Jakarta
- Republik indonesia, 1997. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- <http://id.wikipesia.org/wiki/tipologi-pesisir-glagah-kulonprogo.html>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/252-lokakarya-zonasi-wilayah-pesisir.htm>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/ekosistem-wilayah-pesisir.htm>

LAMPIRAN



Kondisi pasar di sepanjang jalan mardika ambon



UNIVERSITAS

POSOWO



Terminal



Pelabuhan Yos Sudarso

Proyeksi Penduduk di Kawasan Pesisir Kota Ambon

Perkembangan Jumlah Penduduk di Kawasan Pesisir Kota Ambon Tahun 2008-2012

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (Jiwa)
1	2008	69.898	-
2	2009	73.027	3.129
3	2010	75.611	2.584
4	2011	79.988	4.377
5	2012	81.351	1.363

Sumber : BPS Kecamatan Sirimau Tahun 2013

Untuk mendapatkan jumlah penduduk 20 tahun kedepan (2032), maka digunakan rumus Metode Geometrik (Regresi Bunga Berganda) :

$$P_n = P_o (1+r)^n$$

P_n = jumlah penduduk yang dicari

P_o = jumlah penduduk tahun dasar

1 = konstanta

r = rata-rata pertambahan penduduk tahunan

n = selisih tahun

untuk menghitung nilai (r) maka caranya adalah

$$P_n = P_o (1+r)^n$$

$$81.351 = 69.898 (1+r)^n$$

$$(1+r)^n = 81.351 / 69.898$$

$$r = \sqrt[n]{81.351 / 69.898} - 1$$

$$r = 285,22 / 264,38 - 1$$

$$r = 1,09 - 1$$

$$r = 0.09$$

$$P_{2032} = 81.351 (1 + 0.09)^{20}$$

$$P_{2032} = 81.351 (1.09)^{20}$$

$$P_{2032} = 81.351 (14.9)$$

$$P_{2032} = 121.213 \text{ Jiwa.}$$

Jadi Jumlah Penduduk kawasan pesisir Kota Ambon untuk Proyeksi 20 tahun ke depan (2032) adalah *121.213 Jiwa.*

